

# **UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) INDUSTRI KERUPUK RENGGINANG**

(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Disusun Oleh:**

**M. TAUFIQ AKBAR**

**NIM: (105030500111015)**



**Dosen Pembimbing:**

1. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
2. Drs. Minto Hadi, M.Si

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
MALANG**

**2014**

## RINGKASAN

Akbar, M. Taufiq, 2014, **Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)** Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Anggota: Drs. Minto Hadi, M.Si, 138 Hal + xiii

---

Upaya Pemberdayaan yang dilakukan selama ini dengan berbagai bentuk dan variasinya, memiliki tujuan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, karena tujuan utama dari pemberdayaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Industri Kecil Kerupuk rengginang yang terdapat di Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto adalah salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berusaha untuk melakukan upaya pemberdayaan kepada para pengusaha.

Dari pemahaman diatas peneliti mencoba untuk menganalisis berbagai permasalahan yang ada di lapangan dengan menggunakan teori pemberdayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam memberdayakan pengusaha kerupuk rengginang. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi dan Situs dalam penelitian ini berada Di Desa Sawahan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Milles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini membahas tentang Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk memberdayakan Pengusaha Rengginang agar memiliki daya saing. Peningkatan sumber daya manusia, bantuan alat penunjang produksi, kemudahan pengurusan perizinan, dan pemberian pengaturan serta promosi dan pemasaran. Dalam pemberdayaan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan ini secara positif sangat didukung karena merupakan pelestarian makanan tradisional banyak serta melimpahnya tenaga kerja. Hambatan dalam pengembangan usaha kerupuk rengginang adalah mahalanya harga bahan baku, serta tidak adanya kelompok usaha atau paguyuban.

Dengan hasil penulisan diatas maka penulis memberikan saran dalam kaitan ini supaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengupayakan lagi agar segera dibuat paguyuban, memberikan subsidi jika bahan baku mengalami kenaikan, kemudian memberikan inovasi pada varian krupuk rengginang sehingga usaha kerupuk rengginang mampu bersaing dengan produk-produk lain di pasaran.

**Kata Kunci:** *Upaya Pemerintah, Pemberdayaan, Pengusaha Kerupuk Rengginang*



## SUMMARY

Akbar, M. Taufiq, 2014, **Empowering Small and Medium Enterprise Industrial Cracker Rengginang** (Studies in the Department of industry and Commerce of Mojokerto) Commission Advisor, Chairman: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Member: Drs. Minto Hadi, M.Si, 138 pg + xiiiiv

---

Empowerment efforts made during this with various forms and variations of it, have a goal to direct people's lives for the better, because the main goal is to achieve the empowerment of community welfare. Small industries rengginang Crackers contained in the village of Sawahan, Mojokerto District is one of the activities that can foster economic activity surrounding communities, in this case local government through the Office of Mojokerto of industry and Commerce of Mojokerto is trying to make an effort for empowerment of entrepreneurs

The above understanding of researchers trying to analyze the various existing problems in the field by using the theory of empowerment. This is done to determine the extent of the Government's efforts in empowering entrepreneurs rengginang crackers. Later in this study using qualitative research methods with the descriptive approach. The location and the site in research is located in the village of sawahan and dept. of industry and trade district mojokerto areas. The study is done through observation, interview and documentation. A model analysis of data used by researchers is a model milles huberman, and analysis of data consisting of collecting data, the reduction of data, presentation of data, and the withdrawal of the conclusion.

The results of this study discusses about the role efforts by Mojokerto regency administration, through the Department of Industry and Trade Regency Mojokerto for the empower entrepreneurs crackers as a increase competitiveness, improvement of human resources, support equipment supporting production, ease of licensing, and administration as well as promotion and marketing arrangements. In the empowerment by the Department of Industry and Trade is positively strongly supported because it is a lot of traditional food preservation as well as the abundance of labor. The Barriers in the development of effort rengginang cracker is the high price of raw materials, and no business group.

Suggestions from this study is the Department of Trade and Industry must strive Mojokerto again so soon made the association and provide subsidies if raw materials have increased so that businesses are able to compete with crackers rengginang other products on the market.

**Keywords:** *government efforts, Empowerment, entrepreneurs crackers rengginang.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Kerupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik dengan minat Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Prodi Administrasi Pemerintahan.
4. Ibu Trisnawati, S.Sos, M. AP selaku Sekretaris Prodi Administrasi Pemerintahan.
5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku ketua dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyelesaian skripsi. Selain itu, juga telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs Minto Hadi, M.Si selaku anggota dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyelesaian skripsi. Selain itu, juga telah banyak memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil penulis untuk kedepannya dan sangat mendukung langkah saya.
7. Bapak Ali Imron selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta Ibu Ani selaku kepala seksi bidang Industri Makanan, Minuman dan Tembakau yang dengan sabar telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Umi, Bapak Irfan, dan Bapak Syah Roni selaku pengusaha kerupuk rengginang, telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, Agustus 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO .....	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah Daerah .....	10
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	10
2. Pengertian Perangkat Daerah .....	11
3. Struktur dan Fungsi Pemerintah Daerah .....	15
B. Pemberdayaan .....	18
1. Pengertian Pemberdayaan .....	18
2. Tujuan Pemberdayaan .....	22
3. Sasaran Pemberdayaan .....	25
C. Usaha Kecil Menengah .....	26
1. Definisi UKM .....	25
2. Karakteristik UKM .....	27
3. Potensi UKM .....	29
4. Masalah Yang Dihadapi UKM .....	30
5. Upaya Pemberdayaan UKM .....	35

6. Tahap-tahap Pemberdayaan .....	39
-----------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian .....	42
C. Lokasi Dan Situs Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Analisa Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian .....	52
1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto.....	52
a. Sejarah Kabupaten Mojokerto.....	52
b. Keadaan Geografis dan Topografis Kabupaten Mojokerto.....	55
c. Jumlah Penduduk .....	58
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.....	61
a.) Visi Dan Misi Disperindag Kabupaten Mojokerto .....	66
b.) Tujuan dan Sasaran Disperindag.....	69
3. Gambaran Umum Situs Penelitian .....	72
a. Lokasi .....	74
b. Jumlah Penduduk .....	73
c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto .....	73
d. Awal Mula Desa Sawahan Sebagai Sentra Usaha Rengginang ....	75
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	76
1. Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Kerupuk Rengginang (studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto .....	76
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	78
b. Bantuan Peralatan Penunjang Produksi .....	85
c. Kemudahan Pengurusan Perizinan .....	87
d. Promosi dan Pemasaran.....	89
2. Keberdayaan UKM Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto .....	91
a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengusaha dan Karyawan .....	91
b. Pemasaran Hasil Usaha.....	94
c. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap.....	97
3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kerupuk Rengginang	
1. Faktor Pendukung .....	101
a. Pelestarian Makanan Tradisional .....	101
b. Tenaga Kerja Cukup Melimpah .....	102
2. Faktor Penghambat.....	104
a. Mahalnya Harga Bahan Baku .....	104



b. Tidak adanya Kelompok Usaha atau Paguyuban.....	104
C. Pembahasan.....	105
1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Krupuk Rengginang di Desa Sawahan Kec. Mojokerto Kab. Mojokerto Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Mojokerto .....	105
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) .....	108
b. Bantuan Alat Penunjang Produksi .....	111
c. Kemudahan dalam Pengurusan Perizinan .....	112
d. Promosi dan Pemasaran .....	114
2. Keberdayaan UKM Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.....	115
a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengusaha dan Karyawan...119	
b. Pemasaran Hasil Usaha .....	121
c. Tenaga Kerja Yang Terserap .....	125
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Upaya Pemberdayaan UKM Kerupuk Rengginang .....	128
1. Faktor Pendukung .....	128
a. Pelestarian Makanan Tradisional .....	128
b. Tenaga Kerja Cukup Melimpah .....	129
2. Faktor Penghambat.....	131
a. Mahalnya Harga Bahan Baku .....	131
b. Tidak Adanya Kelompok Usaha atau Paguyuban.....	132

## BAB V Penutup

a. Kesimpulan .....	131
b. Saran .....	134

Daftar Pustaka .....	xv
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Bagian Pokok Organisasi Pemerintah Daerah .....	17
2.	Tinggi dan Luas Menurut Kecamatan .....	56
3.	Jumlah Penduduk Tahun 2009 - 2011 .....	59
4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	59
5.	Keadaan Perekonomian/Mata Pencaharian Tahun 2013 .....	74
6.	Status Kepemilikan Industri .....	75
7.	Data Nilai Investasi dan Nilai Produksi Pada Tahun 2012 .....	93
8.	Data Tingkat Pemasaran Dan Jumlah Bahan Bakar 2012 .....	96
9.	Jumlah Tenaga Kerja dan Jenis Produksi Pada Tahun 2012 .....	100



## DAFTAR GAMBAR

Gambar.	Judul	Halaman
1.	Bagian Pokok Pembentuk Struktur dan Fungsi.....	15
2.	Model Analisis Data Kualitatif.....	49
3.	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto ....	61
4.	Kemasan Kerupuk Rengginang Siap Jual .....	84
5.	Mesin Pengemas Kerupuk Rengginang .....	86
6.	Karyawan Melakukan Proses Pengemasan .....	99



## DAFTAR LAMPIRAN

NO.	Judul	Jumlah Halaman
1.	Interview Guide.....	3
2.	Daftar Riwayat Hidup .....	1
3.	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bakesbangpol Mojokerto .....	1
4.	Surat Ijin penelitian dari Desa Sawahan.....	1





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Globalisasi telah berlaku secara *universal* sejak disahkannya perjanjian WTO (*World Trade Organization*) di Marakesh (Maroko) pada tahun 1994. Munculnya globalisasi akibat dari pemerintah terlalu ikut campur dalam segala urusan termasuk bidang ekonomi maka dari itu muncullah globalisasi dimana inti dari adanya globalisasi adalah mempercepat interaksi ekonomi antar negara yang salah satunya dapat dicapai dengan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan. (Yustika, 2007:52). Namun dengan adanya globalisasi tidak lantas menghilangkan intervensi pemerintah, justru intervensi perlu didorong kebawah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri salah satunya yakni dengan melakukan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi.

Pemerintah Indonesia selaku nahkoda utama dalam mengawal keberlangsungan negara wajib mengupayakan terciptanya pembangunan di segala bidang. Menurut (Michael P. Todaro 2009:27) :

“Pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat telah, melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam penerapannya pembangunan memiliki beberapa tujuan”

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.
2. Peningkatan standart hidup yang bukan hanya peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Serta keseluruhan, hal-hal yang tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materil (material well-being) tetapi juga menumbuhkan harga diri dari individu dan bangsa
3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dalam perasaan bergantung kepada orang dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

Dari tujuan pembangunan tersebut pemerintah memiliki tugas yang berat yakni mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan. Sektor perekonomian merupakan sektor yang mendapat prioritas utama diantara sektor-sektor yang lain, melihat pentingnya sektor demikian diharapkan dalam mencapai tujuannya dapat tercapai sehingga memberikan setimulus terhadap sektor-sektor yang lainnya. Pembangunan ekonomi wajib dilakukan oleh seluruh negara didunia karena maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari tingkat pembangunan disegala bidang khususnya bidang perekonomian.

Dalam bidang perekonomian, Indonesia termasuk negara yang potensial dalam perekonomian dunia dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Berdasarkan biro sensus AS per 2014 Indonesia menempati peringkat empat dengan jumlah penduduk 253,60 juta jiwa. ([www.finance.detik.com/03/Juni/2014/](http://www.finance.detik.com/03/Juni/2014/) “negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia”).



Dengan banyaknya jumlah penduduk maka berbanding lurus dengan permintaan akan pemenuhan kebutuhan hidup, padahal seperti yang kita ketahui banyak produk di dalam negeri sebagian besar dikuasai oleh produk luar negeri.

Kondisi demikian harus di baca oleh pemerintah selaku pelindung masyarakat dalam kaitan hal ini pemerintah harus memberikan penyediaan-penyediaan terhadap barang kebutuhan hidup dengan tetap memperhatikan para pelaku usaha dalam negeri. Dari itu pemerintah berkewajiban melakukan penguatan terhadap produk-produk dalam negeri yang apabia tidak mendapat perhatian khusus bisa berdampak pada banyak usaha dalam negeri yang mengalami penutupan akibat kalah bersaing dengan produk dari luar, tutupnya usaha dalam negeri bisa berdampak pada semakin banyaknya pengangguran dan bisa mengarah pada kemiskinan-kemiskinan baru. Kemiskinan merupakan masalah serius yang tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia problem demikian juga menjadi masalah bagi bangsa lain.

Kemiskinan di Indonesia merupakan bukan hal baru sekitar seabad sebelum kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan Belanda pun telah merasakan kemiskinan. Setelah lebih 50 tahun pasca kemerdekaan, kemiskinan masih menjadi masalah yang serius. Tepatnya pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis multi dimensi jumlah warga miskin yang sebelumnya berhasil ditekan menjadi sekitar 22,5 juta (11%) disinyalir oleh Badan Pusat Statistik sempat menjadi sekitar 39,4 juta (24%) pada puncak krisis tahun 1998 sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) masal (Bashith 2012:2).

Kalau kita lihat krisis ekonomi yang melanda Indonesia kala itu membawa akibat yang cukup parah bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari tutupnya perusahaan-perusahaan besar yang selama ini menguasai perekonomian dalam negeri. Sektor industri kecil yang kala itu mempunyai daya tahan yang tinggi mampu bertahan dari badai krisis ekonomi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka penguatan bidang perindustrian pemerintah telah membuat peraturan-peraturan yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap perindustrian.

Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2014 dan tentang perindustrian merupakan wujud pengaturan serta pemberian perlindungan terhadap pembangunan Industri dalam negeri. Seperti yang kita ketahui Industri yang bersekala kecil, sedang, dan besar merupakan salah satu tiang penopang perekonomian Indonesia. Dilihat dari beberapa skala industri yang ada, industri yang sesuai dengan kondisi bangsa yang sedang berkembang ialah industri yang memerlukan modal sedikit dan mampu menyerap tenaga kerja ialah industri kecil atau yang sering di sebut UKM (Usaha Kecil Menengah).

UKM di Indonesia mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga mampu menyerap tenaga kerja. Menurut data yang bersumber dari BPS (2004, 2006) tersebut, sebagian besar dari usaha nasional adalah berkatagori UKM, yaitu sebanyak hampir 45 juta unit pada tahun 2005 atau sekitar 99 persen dari total usaha nasional. UKM ini menciptakan lapangan kerja sebesar 96 persen dari total tenaga kerja pada usaha



nasional dan menyumbang sampai dengan 60 persen output yang dihasilkan usaha nasional pada sektor non migas. (Putra, 2007:14).

Melihat presentase demikian, banyak masyarakat Indonesia yang mengantungkan nasibnya pada sektor industri kecil. Pemerintah sebagai penanggung jawab keberlangsungan kehidupan bangsa perlu menciptakan partisipasi dalam penciptaan lapangan kerja melalui progam-progam berbasis pemberdayaan dalam hal ini Pemerintah berkewajiban memberikan arahan, bimbingan, serta melindungi masyarakat dari permasalahan yang ada. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”

Pemerintah dalam rangka pemberdayaan dalam kaitan dengan Industri kecil telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat secara sinergis untuk menumbuhkan usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan Pemberdayaan Usaha, Kecil, dan Menengah tercantum pada pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut.

1. Mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, Penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto merupakan sentra industri kecil penghasil kerupuk rengginang. Industri yang berbahan dasar dari beras ketan merupakan salah satu produk asli masyarakat Mojokerto yang sudah mulai kehilangan peminat. Menurut wawancara dengan Ibu Anie selaku kepala seksi bidang industri makanan, minuman dan tembakau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto:

“Bahwa banyak pasar-pasar daerah yang diserbu oleh barang-barang asing ditambah kerupuk rengginang merupakan makanan olahan tradisional sehingga kurang diminati. Maka dari itu agar keberadaan makanan tradisional ini tidak hilang karena kalah bersaing dengan makanan dari luar maka pemerintah yakni Disperindag melakukan upaya-upaya pemberdayaan dengan agar identitas lokal tidak hilang”.

Mengingat industri kerupuk rengginang tersebut apabila dilakukan pemberdayaan bukan tidak mungkin bisa menjadi sumber ekonomi potensial sekaligus menjadi simbol kebanggaan dari masyarakat Mojokerto yang nantinya juga diharapkan semakin banyak UKM yang berkembang akan dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas, bahwa betapa pentingnya sektor UKM dan keberadaan industri kerupuk rengginang dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah khususnya Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai pemberdayaan UKM di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Sehingga akan dilakukan penelitian skripsi dengan judul



**“Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Kerupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan industri kecil “Krupuk Rengginang” di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimanakah keberdayaan UKM yang dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan pemberdayaan Industri kecil “Krupuk Rengginang” di Kabupaten Mojokerto?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan UKM Industri “Krupuk Rengginang” di Kabupaten Mojokerto.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai keberdayaan yang telah diperoleh setelah dilaksanakan proses pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil kerupuk rengginang di Kabupaten Mojokerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan, terutama dalam pemberdayaan industri kecil kerupuk rengginang

- 2) Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai pemberdayaan industri kecil.

- b. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

- 2) Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan industri kerupuk rengginang Kabupaten Mojokerto.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini dimulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup.

Pada Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, yang menguraikan tentang perlunya upaya pemberdayaan terhadap industri kecil, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada Bab III Metode Penelitian, menguraikan metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data yang menggunakan model spradley.

Pada Bab IV Hasil dan Pembahasan, menyajikan data-data dari hasil penelitian terkait dengan kajian pemberdayaan UKM kerupuk Rengginang, gambaran umum lokasi penelitian, dan data fokus penelitian, kemudian data-data dari hasil penelitian tersebut dianalisa dan diinterpretasikan.

Pada Bab V Penutup, menguraikan tentang kesimpulan yang telah dibahas dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis dari masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pemerintah Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia seringkali diistilahkan sebagai *local government* sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaho dalam (Jimung, 2005:40) yang mengartikan *local government* sebagai

“bagian dari pemerintah suatu Negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang – Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di wilayah kekuasaannya”.

Sedangkan menurut Hoessin dalam (Muluk, 2005:10) mengemukakan bahwa *local government* merupakan konsep yang mengandung 3 arti, yaitu :

1. Berarti pemerintah lokal yang seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah
2. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan pemerintah lokal (mengacu pada fungsi)
3. Bermakna daerah otonom

Perlu diketahui pula bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban (sebagai daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Pengertian Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah Seperti yang tercantum dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah pasal 1 ayat 8 adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa. Organisasi atau lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perangkat daerah dibentuk oleh daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi perangkat daerah dengan Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, kelembagaan fungsi staf dan lini pendukung yang tegas, efisien, dan efektivitas yang jelas. Hal ini dimaksudkan sebagai pemberian arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional kepada daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari:



- a. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat.
- b. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat.
- c. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan.
- d. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
- e. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan-kebutuhan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.

Perangkat daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, implementasi penataan lembaga perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip



organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara efisien dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Sesuai dengan kebijakan PP No. 41 Tahun 2007, perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari :

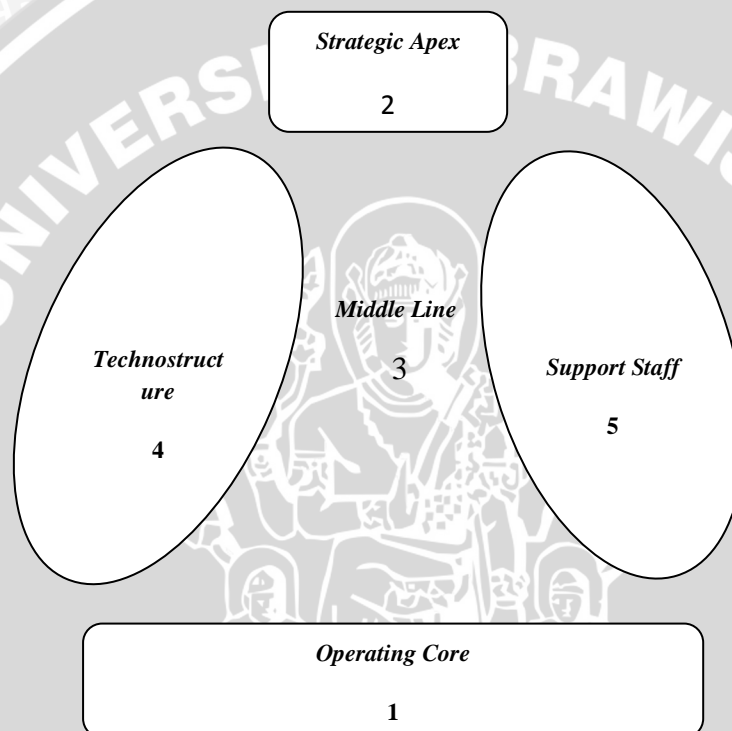
- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur, bupati atau walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi sekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, dan inspektorat kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- e. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
- f. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- g. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus daerah.
- h. Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- i. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan, kelurahan dipimpin oleh lurah.

### 3. Struktur dan Fungsi Institusi Pemerintah Daerah

Dalam organisasi atau institusi khususnya pada organisasi perangkat daerah memiliki lima bagian pokok pembentuknya dimana setiap bagian memiliki hubungan dengan bagian yang lain. Lima bagian pokok dalam organisasi yaitu:



**Gambar 1 Bagian Pokok Pembentuk Struktur dan Fungsi**

*Sumber : Mintzberg dalam (Robbins, 1994:304)*

Fungsi pokok institusi dalam Mintzberg dalam (Robbins, 1994:304):

#### 1. *The Operating Core*

Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Jika kontrol berada di *operating core*, maka keputusan akan di desentralisasi. Hal ini menciptakan birokrasi professional.



### 2. *The Strategic Apex*

Manajer tingkat puncak, yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu. Jika *strategic apex* yang dominan, maka kontrol desentralisasi dan organisasi tersebut merupakan struktur yang sederhana.

### 3. *The Middle Line*

Para manajer yang menjadi penghubung *operating core* dengan *strategic apex*. Jika *middle management* yang mengontrol, maka anda akan menemukan kelompok dari unit otonomi yang bekerja dalam sebuah struktur divisional.

### 4. *The Technostructure*

Para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Jika para analisis dalam *technostructure* yang dominan, kontrol akan dilakukan melalui standarisasi, dan struktur yang dihasilkan adalah sebuah birokrasi mesin. Akhirnya, dalam situasi di mana staf pendukung yang mengatur, maka kontrol akan dilakukan melalui penyesuaian bersama (*mutual adjustment*)

### 5. *The Support Staff*

Orang-orang yang mengisi unit staf, yang member jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi.

Di dalam organisasi pemerintah daerah ke lima unit pokok di atas dapat diklasifikasikan menurut bagian di dalam organisasi perangkat daerah. Tabel di

bawah ini merupakan pengelompokan bagian pokok organisasi perangkat daerah berdasarkan lima unit pokok diatas.

**Tabel 1**

**Bagian Pokok Organisasi Pemerintah Daerah**

NO	Bagian	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Strategic Apex	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah DPRD
2.	The Middle Line	Sekretaris Daerah Asisten Daerah
3.	The Technostructure	Lembaga teknis Daerah
4.	The Operating Core	Dinas Daerah Kecamatan Kelurahan
5.	The Support Staff	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Dinas Sekretariat Lembaga Teknis Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kelurahan

*Sumber: RKPD Kabupaten Mojokerto 2013*

Dengan melihat data tentang organisasi perangkat daerah diatas maka terlihat bahwa terdapat pemfokusan bagian di dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah. Pemerintah daerah memiliki lembaga teknis di dalam pengelolaan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Mojokerto yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan memperhatikan relevansi dengan judul dan situs penelitian maka di dalam penelitian ini difokuskan pada birokrasi yang mengurus manajemen perindustrian dan perdagangan

## B. Pemberdayaan

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan atau empowerment yang dibidani oleh friedman (1992), munculnya karena dua hal yakni kegagalan dari harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalannya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul akibat dari adanya alternatif-alternatif pembangunan yang dimasukkan nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dari harapan menurut friedman dalam Harjanto (2008: 24) bukan merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai normatif dari moral. Kegagalan dari harapan akan merasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan pada adalah hanya gejala dari kegagalan dan harapan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat hakekatnya merupakan nilai kolektif dari pemberdayaan individual.

Konsep *empowerment* sebagai suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberikan tekanan pada ekonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi dari pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah persoalan likalitas, sebab civil society akan lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Namun friedman juga meningkatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur struktur diluar *civil society* diabaikan. Oleh karena itu menurut Firedman,



pemberdayaan manusia tidak hanya sebatas faktor ekonomi saja tetapi juga faktor politik, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional ataupun internasional Friedman dalam (Harjanto, 2008: 24).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1996: 214), istilah pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti kekuatan, berkemampuan, bertenaga untuk melakukan sesuatu, berdasarkan asal katanya pemberdayaan atau memberdayakan berasal dari kata *empowerment* dan *empower*, yang menurut Webster dalam (Sedamaryanti, 2003: 59) mengandung arti:

“Pertama, *to give power or authority to*, serta arti kedua berarti *give ability to or enable*. Dimana pengertian pertama mengandung makna memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otorisasi kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua mengandung makna sebagai upaya memberi kemampuan atau keberdayaan”

Pemberdayaan masyarakat menurut (Sumodiningrat, dkk, 2000: 4), mengandung tiga pengertian, yaitu: “pertama, pemihakan atau memberi prioritas kepada yang paling memerlukan, kedua, mempersiapkan kepada masyarakat yang memperoleh prioritas dalam upaya menyamakan level (*level playing field*) dan yang ketiga melindungi segenap pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang mempunyai prioritas diberdayakan”

Sedangkan menurut Kartasamita (1996: 144), bahwa memberdayakan masyarakat mengandung arti: “upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu, hanya dengan mengandalkan pada kekuatan diri sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga memberdayakan mempunyai pengertian memampukan dan memandirikan masyarakat. dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah dengan pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya". Lebih lanjut Kartasmita (1996: 152), menambahkan bahwa:

"pemberdayaan pada hakekatnya berada pada diri manusia, sedangkan faktor luar manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya".

Selanjutnya menurut Pranarka dan Moljarto dalam Sedarmayanti (2003: 60), menyebutkan setidaknya ada dua kecenderungan yang terjadi dalam proses pemberdayaan, yaitu: "Pertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar hidup menjadi lebih berdaya, disebut juga sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua menekankan pada proses



menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan keberadaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog, disebut juga kecenderungan sekunder”.

Pengertian pemberdayaan diatas berdasarkan diatas berdasarkan asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, pada dasarnya semua masyarakat memiliki potensi, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan ini adalah pengembangan daya yang dimiliki masyarakat tersebut. Dari uraian tersebut Sulistiyani (2004: 79), menyimpulkan bahwa “pemberdayaan adalah upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya”. Sedangkan definisi pemberdayaan menurut Suharto (2005: 57-59), dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan yaitu:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah;
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya;
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial;
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Dari pengertian diatas, Person dalam Suharto (2005: 63), mengajukan tiga dimensi pemberdayaan merujuk pada:



- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar;
- b. Sebuah keadaan psikologi yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri orang lain;
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan makna dari pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan sebagai kebijakan dan program pembangunan kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, (b) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni bersifat *“people centered, participatory, empowering and sustainable”*.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi untuk mencapai pemecahan masalah yang

dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konotatif, psikomotorik, afektif dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian, untuk menjadi mandiri perlu dukungan berupa kemampuan sumberdaya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat itu diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini dapat diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal. Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu dan Matson dalam Sulistiyani (2004: 81) yang mengusulkan konsep *The Good Community and Competence* yang meliputi Sembilan komunitas yang baik dan empat komponen kompetensi masyarakat. *The Good Community and Competency* tersebut yaitu:

- a. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok primer;
- b. Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingan sendiri secara bertanggung jawab;
- c. Memiliki viabilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri;



- d. Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan rill, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya;
- e. Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama;
- f. Komunitas memberi makna kepada anggota;
- g. Adanya heterogenitas dan beda pendapat;
- h. Pelayanan masyarakat ditempatkan dekat dan cepat kepada yang berkepentingan;
- i. Adanya konflik dan *managing conflict*.

Pada awalnya upaya pemberdayaan masyarakat pasti dihadapkan pada kondisi masyarakat yang lemah.mungkin terjadi pada masyarakat secara keseluruhan yang berada pada wilayah tertentu sama sekali belum berdaya. Dengan demikian orientasi pemberdayaan memang secara tegas merujuk pada suatu target group masyarakat itu sendiri. Disisi lain, sangat mungkin terjadi bahwa sasaran yang perlu diberdayakan itu hanyalah sebagian dari masyarakat saja, yaitu khususnya pihak yang belum memiliki daya.

Dapat dicontohkan misalnya masyarakat miskin kota yang berada pada suatu kawasan, yang sebenarnya warga masyarakat yang bersifat heterogen dapat dilihat dari aspek pendapatan. Ada anggota masyarakat yang kaya raya, berkecukupan, pendapatan rendah, berada di garis kemiskinan dan dibawah garis kemiskinan. Dilihat dari heterogenitas tersebut, maka ada sebagian masyarakat yang sudah tidak perlu lagi diberdayakan namun disisi lain masih ada kelompok miskin kota yan perlu diberdayakan. Hal inilah yang selanjutnya disebut dengan



komunitas miskin. Apa yang ingin dicapai untuk meningkatkan kondisi komunitas tersebut melalui Sembilan langkah sebagaimana telah dikemukakan diatas. Sedangkan untuk melengkapi sebuah komitmen yang baik, perlu ditambahkan kompetensi berikut:

- a. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan manusia;
- b. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas;
- c. Mampu menemukan dan menyepakati secara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui;
- d. Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan Montagu dan Matson dalam (Sulistiyani, 2004: 82).

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi terbaik dalam pembangunan sosial. Disamping itu, kompetensi keempat merupakan kompetensi masyarakat untuk menentukan strategi dalam merealisasikan solusi yang telah ditetapkan. Itu semua itu akan terwujud apabila proses belajar yang efektif. proses belajar tersebut merupakan suatu keharusan untuk ditempuh, karena sebagai suatu metodologi/cara yang tidak dapat dihindari.

### **3. Sasaran Pemberdayaan**

Sasaran pemberdayaan merupakan masyarakat miskin hal, ini sesuai dengan pernyataan Schumacher dalam (Sulistiyani, 2004: 90), yang memiliki pandangan bahwa pemberdayaan sebagai dari masyarakat miskin dengan tidak harus mengetimpangkan structural lebih dulu, Masyarakat miskin sesungguhnya

juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih baik dari pada memberikan ikan”. Disamping itu NGO. Merupakan agen yang mendapat posisi penting, karena dipandang lebih bersifat entrepreneur, berpengalaman dan inovatif dibanding pemerintah

Dengan demikian untuk mencapai sasaran pemberdayaan, diperlukan kemitraan yang selaras antara masyarakat, pemerintah, dan swasta sebagai wujud good governance.

### **C. Usaha Kecil Menengah ( UKM )**

#### **1. Definisi UKM**

Menurut Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 yang dimaksud Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

BPS dalam hal ini membagi jenis-jenis UKM berdasarkan besarnya jumlah pekerja, yaitu : (a) kerajinan rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja dibawah tiga orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar, (b) usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5-9 orang, (c) usaha menengah sebanyak 20-99.

Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- 3) Milik Warga Negara Indonesia (WNI)
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- 5) Berbentuk usaha orang-perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dalam mendefinisikan mengenai UKM dapat ditinjau dari sudut pandang misalnya dari segi jumlah tenaga kerja dan aset yang dimiliki. Akan tetapi perbedaan tersebut dirasakan wajar sepanjang tidak menyimpang dari karakteristik UKM.

## **2. Karakteristik UKM**

Di lihat dari segi hukum, UKM saat ini tengah pada posisi yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan, tidak berakta notaris. Adapun jika ditinjau dari segi ekonomi keberadaan UKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar, hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang terorganisir. Para pengusaha kurang menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi yang lain sebagai kekuatan untuk menggalang kekuatan bersama.



Namun walaupun demikian UKM di Indonesia masih mampu bertahan hal itu dikarenakan oleh 4 (empat) hal, yaitu :

1. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama.
2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha.
3. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja.
4. Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

Untuk memahami lagi penjelasan diatas maka dalam hal ini juga diperlukan pemahaman mengenai karakteristik Usaha Kecil. Karakteristik usaha kecil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus terapan (Anoraga dan Sudantoko, 2002:225).

Sedangkan karakteristik UKM secara umum yaitu mereka lebih suka bekerja sendiri-sendiri atau bahkan saling mematikan. Koperasi yang diharapkan oleh pemerintah sebagai salah satu wahana pembinaan UKM tampaknya kurang

berjalan, karena hanya sebagian kecil dari pengusaha yang menggunakan jasa pelayanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh koperasi. Aspek lain yang juga melekat pada UKM yaitu rendahnya kualitas SDM sehingga menjadi salah satu penyebab sulitnya bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas.

### 3. Potensi UKM

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan yang penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (*establishment*) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Dari segi penciptaan lapangan kerja industri kecil ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar dengan menggunakan sumber daya lokal dan usahanya relatif fleksibel. Sedangkan jika ditinjau dari segi jumlah usaha (*establishment*), UKM memainkan peran dinamis yang potensial dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, menyesuaikan dan mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru dan meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. UKM juga memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong ekspor non migas di Indonesia.

Bahkan telah ada kebijakan-kebijakan khusus yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan di masa lalu, seperti perlindungan terhadap impor untuk produk tertentu, perlindungan kategori investasi untuk perusahaan-perusahaan kecil, skema kredit, dorongan moral bagi perusahaan besar untuk mendukung perusahaan kecil misalnya program bapak angkat, dan sikap selektif pemerintah dalam berkontak (Triyuwono dan Yustika, 2003:75)

Berdasarkan hasil survey dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa kontribusi UKM terhadap PDB pada tahun 2009 tercatat



sebesar 53, 32 % dan pada tahun 2011 kontribusi meningkat menjadi 56,5 %. Disamping itu jumlah UKM di tahun 2011 menembus angka 55, 21 juta unit. Dengan proporsi usaha kecil sebanyak 609.195 unit, sedangkan usaha menengah menyumbang 44.280 unit (sumber: ekonomi.kompasiana.com).

Walaupun jika melihat data diatas peran dan kontribusi UKM mengalami kenaikan pertumbuhan akan tetapi kondisi UKM masih tetap rawan pada keberpihakan bank yang rendah, pasar bebas yang sudah dibuka serta terbatasnya kebijakan pemerintah yang memihak pada sektor usaha kecil. Oleh karena itu untuk tetap meningkatkan pertumbuhan UKM di tahun-tahun selanjutnya maka diperlukan adanya keikutsertaan beberapa stakeholder yang terlibat dalam pertumbuhan UKM ini.

#### **4. Masalah Yang Dihadapi UKM**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Namun UMKM pada umumnya juga mempunyai permasalahan-permasalahan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Jafar (2004:41):

##### **A. Faktor Internal**

##### **1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan**



Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

## 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha

kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

### 3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

## B. Faktor Eksternal

### 1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan

kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

## 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.



### 3. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

### 4. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

##### 5. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

##### 6. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Berdasarkan keterangan diatas maka upaya mengenai pengembangan UKM tersebut sangat penting dalam meminimalisir kendala-kendala yang akan menghambat pencapaian tujuan pengembangan UKM. Pada pelaksanaan pengembangan UKM tersebut diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan pengusaha UKM. Hal ini diperlukan karena dalam kenyataannya di lapangan masih ditemukannya beberapa kendala mengenai keterkaitan perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha UKM yang tentunya dalam hal ini nantinya akan dapat merugikan kedua belah pihak.

##### 5. Upaya Pemberdayaan UMKM

Tahap yang pertama dari setiap organisasi yang tertarik dalam pemerintah daerah adalah bagaimana menentukan Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah hendaknya selalu berada didepan dalam memberikan penghargaan dan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah dalam hal ini



bertindak menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta seperti jalan raya, keadilan, keamanan dan pemberdayaan usaha kecil menengah.

Menurut Tohar (2002:163) dalam mewujudkan akses atau kemudahan bagi pengembangan usaha kecil menengah, pemerintah telah berupaya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meluncurkan program-program pelatihan misalnya pelatihan motivasi dengan metode *achievement*, motivation training. Pelatihan ini bertujuan untuk membangkitkan etos kerja/teknik produksi, pemasaran, administrasi usaha, promosi pemasaran. Pada saat ini pemerintah daerah berupaya lebih menggambarkan usaha industri kecil yang merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan.

Sedangkan upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM menurut Sjaifudin (1995:66-75) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Finansial  
Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui “penyertaan modal sementara”.
2. Pengembangan Pemasaran  
Pada era pasar bebas seperti saat ini dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional, hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi usaha kecil. Terdapat tiga cara strategi pemberdayaan pemasaran, yaitu:
  - a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar  
Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan (*vertical*) subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pola subkontrak ini memberi manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah kelangkaan bahan baku, kadang juga modal.
  - b. Proteksi pasar



Bentuk proteksi yang dilakukan adalah melalui konsumsi. Sekitar hanya 10% dari total anggaran pemerintah yang digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk buatan usaha kecil.

- c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi Persaingan  
Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar, modal bukanlah kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan disini antara lain penghapusan proteksi *infrant industries* mendorong terciptanya iklim persaingan dan reorientasi lembaga koperasi kearah bisnis. Dalam konteks ini fungsi kontrol sangat diperlukan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem pemagangan (*link and match*) serta pemberian insentif bagi pertumbuhan pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SDM dan teknologi.

4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian

- a. Pengaturan dan Perijinan

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada empat jenis perijinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha kecil yaitu ijin tempat usaha, kelayakan usaha, lokasi serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, ijin usaha industri serta ijin perdagangan.

- b. Perencanaan Tata Ruang

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan usaha kecil melalui: (1) pelibatan kepentingan usaha kecil dalam perencanaan, (2) proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, (3) pengakuan sungguh-sungguh terhadap peran dan fungsi usaha kecil bagi lingkungan masyarakat.

- c. Fungsi Kelembagaan

Dalam hal ini instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan inisiatif untuk mengembangkan usaha kecil serta terpadu dan berjangka panjang yang sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut arsyad (1999:120) ada 4 peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah yaitu :

- a. Sebagai *entrepreneur*, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis.

- b. Sebagai *coordinator*, bahwa pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi.
- c. Sebagai fasilitator, bahwa pemerintahan daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya.
- d. Sebagai *stimulator*, bahwa pemerintahan daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.

Peran pemerintah lokal dalam hal ini perlu juga didukung oleh partisipasi masyarakat, karena jika tidak maka tujuan dari pemerintah tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Adapun disini peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dapat diwujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014 dengan fokus penguatan dan penumbuhan sektor industri. Oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pola pemberdayaan yang terkait dengan pengembangan industri kecil menengah ([www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id)).

Agar pemberdayaan dapat tumbuh dengan baik, maka diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak yang dapat menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. oleh karena itu, diperlukan suatu upaya tertentu seperti yang dikemukakan oleh Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40), yang mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan adalah:

- a. Bantuan dana sebagai usaha;
- b. Pembangunan perasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- c. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat;



- d. Pelatihan sebagai aparat dan masyarakat;
- e. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Dapat dilihat bahwa upaya tersebut buakan hanya dalam peningkatan pada bidang perekonomian saja, tetapi juga diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah serta melalui pelatihan-pelatihan.

## 6. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996:74) dilakukan melalui 3 arah yaitu:

- 1) Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan
- 2) Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
- 3) Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemikiran kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Ketiga arah pemberdayaan diatas berpangkal pada 2 sasaran utama yaitu:

- 1) Untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan
- 2) Untuk memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan



(Sumodiningrat : 1996)

Untuk sampai pada ketiga sasaran di atas maka proses pemberdayaan masyarakat industri kecil dan UKM menurut Priyono dan Pranarka (1996:2) dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah
- 2) Fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat.
- 3) Fase emansipatoris, proses pemberdayaan ini berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan di dukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Pada fase emansipatoris ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasi diri, kegiatan pemberdayaan terhadap industri kecil dan UKM seperti pengrajin perak telah mencapai puncaknya.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian, dimana penulis dapat menentukan secara pasti kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa metode memiliki arti “cara yang tersusun teratur, untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan” Daryanto (1997:439).

Penelitian dalam bahasa Inggris berarti *research* berarti usaha untuk mencapai kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara sistematis serta sempurna terhadap permasalahan. Dengan demikian metode penelitian cara yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian menurut Singarimbun dan Efendi (1987:8) yaitu “Suatu proses panjang, yang berasal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan teori, konseptualitas, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya”.

Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Metode penelitian tersebut sangat berguna dalam proses pengumpulan data, dalam kaitan ini adalah tentang “Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri

Krupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)” metode penelitian memuat beberapa tahapan yaitu:

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif karena berupaya mengungkap suatu permasalahan dengan keadaan sebagaimana adanya atau menggambarkan bagaimana proses kegiatan dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto) disamping itu penelitian deskriptif tidak hanya sebatas pengumpulan data dan penjelasan saja, tetapi menganalisis dan menginterpretasikannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penggunaan jenis demikian sangat mendukung dengan fokus penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2008:6).



## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian maksudnya adalah untuk membatasi studi bagi peneliti dalam menentukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisa dalam suatu penelitian (Sugiyono: 2007).

Fokus penelitian adalah sebagai berikut:

### **A. Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto**

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Bantuan Sarana-Prasarana Penunjang Produksi.
3. Kemudahan Pengurusan Perizinan.
4. Promosi dan Pemasaran.

### **B. Keberdayaan UMKM yang dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Meliputi**

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengusaha Kerupuk Rengginang
2. Pemasaran Hasil Usaha
3. Tenaga Kerja yang Terserap

### **C. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan usaha kecil menengah kerupuk rengginang**

1. Faktor Pendukung
  - a. Pelestarian Makanan Tradisional

- b. Tenaga Kerja yang Cukup Melimpah
2. Faktor Penghambat
  - a. Mahalnya Harga Bahan Baku
  - b. Tidak Adanya Kelompok Usaha atau Paguyuban

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dikarenakan disini memiliki industri kecil yang layak untuk dikembangkan sehingga mendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian berkaitan dengan topik penelitian.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dari objek-objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto
2. Kantor Kelurahan Desa Sawahan
3. Pengusaha Krupuk Rengginang

### **D. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Subjek disini ialah seorang atau sesuatu hal atau benda yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data-data. Lofland dalam Moleong (1986:112)

menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber data dari orang-orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti juga dari dokumen yang menyediakan data-data yang dibutuhkan. Sumber data disini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

- a. Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto
- b. Kepala Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
- c. Pengusaha Krupuk Rengginang

2. Sumber Data Skunder

Berasal dari laporan-laporan, arsip-arsip, dokumen yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian.

Sember-sumber sekunder tersebut adalah:

- a. Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto
- b. Arsip Kantor Kelurahan Desa Sawahan
- c. Data dan dokumen yang diambil dari berbagai sumber.



### E. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### 1. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan gejala-gejala tertentu secara langsung dengan menggunakan pengamatan dan pendapat orang lain di lokasi penelitian.

#### 2. Wawancara

Peneliti mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan atau informasi lisan secara bebas dan mendalam. Keuntungan dari wawancara antara lain untuk mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri subyek penelitian dalam hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lalu sekarang dan masa datang.

#### 1. Dokumentasi

Cara ini digunakan dengan mengamati, mencatat serta mempelajari catatan-catatan dalam berbagai bentuk yang isinya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kesemuanya itu dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berguna dalam analisis data.

## F. Instrument Penelitian

### 1. Peneliti sendiri

Yakni peneliti sendiri yang melakukan penggalian data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti serta fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan masalah peneliti.

### 2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

3. Yaitu berupa materi-materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber.

### 4. Perangkat penunjang lainnya

Yang meliputi: alat perekam, kamera, peralatan tulis menulis dll.

## G. Analisis Data

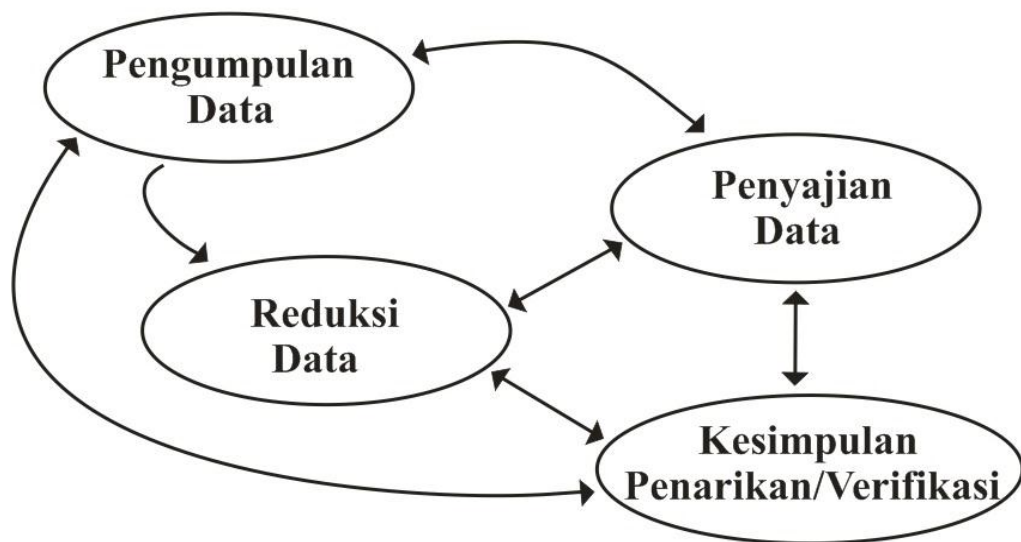
Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Konsep analisis data kualitatif menurut Seiddel dalam (Basrowi dan Suwandi, 2008:193) prosesnya adalah:

1. Mencatat peristiwa yang ada di lapangan berupa catatan lapangan kemudian diberi kode sehingga sumber data dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan memilah-milah melakukan klasifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar, dan memberi indeks.
3. Berpikir untuk memperjelas kategori data sehingga data yang ada bermakna dengan mencari dan menemukan temuan-temuan umum.

Proses menganalisis dalam metode kualitatif dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis model interaktif Milles dan Hubberman (1992) dalam (Sugiyono, 2011:246). Model Interaktif dari Milles dan Huberman ini dipilih peneliti dengan pertimbangan secara penelitian kualitatif ini sesuai untuk mengetahui Faktor X guna mendapatkan suatu dampak berupa Y maka model ini sesuai dengan alur berfikir tersebut, artinya data yang nantinya di dapat dilapangan terkait Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengusaha kerupuk rengginang harus terlebih dahulu direduksi untuk diperoleh suatu gambaran secara pasti terkait dengan detail masalah dan fenomena yang ada di lapangan, setelah itu dipilah melalui penyajian data, serta yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan untuk kemudian mengetahui apakah benar yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan sudah mampu membuat pengusaha kerupuk rengginang menjadi lebih berdaya.

Analisis data kualitatif menurut Milles dan Hubberman (1992) dalam (Sugiyono, 2011:247-252) terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, model analisis interaktifnya bisa dilihat pada gambar 2.





**Gambar 2: Model Analisis Data Kualitatif**

*Sumber : Miles dan Huberman diterjemahkan oleh (Sugiyono, 2011:247)*

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Pengumpulan Data:** Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas, yang terdiri dari Wawancara dan dokumentasi dengan narasumber-narasumber yang relevan dengan fokus penelitian, seperti wawancara kepada perangkat desa, perwakilan Disperindag, perwakilan pengusaha kerupuk rengginang di dalam pemberdayaan.

2. Reduksi Data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Artinya disini peneliti melakukan penelaahan terhadap semua data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan dan yang telah dijelaskan diatas. Peneliti melakukan proses reduksi data terhadap data yang dikumpulkan dengan cara membuat tabelisasi dan abstraksi, yaitu berusaha membuat rangkuman pada masing-masing fokus. Dalam proses ini peneliti juga mengabaikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang tersaji adalah data yang memang berhubungan dengan judul dari penelitian itu sendiri.
3. Penyajian Data adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya disini bahwa data yang telah direduksi peneliti dari Fakta dan kejadian dilapangan dari pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan pengusaha kerupuk rengginang, kemudian peneliti melakukan display dalam bentuk laporan, penyajian data yang bersumber dari situs Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dan lokasi penelitian di Desa Sawahan kemudian disajikan sesuai dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi diintrepetasikan oleh peneliti dan juga dihubungkan

dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisis pembahasan terkait dengan Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Dalam Pemberdayaan Pengusaha kerupuk rengginang.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

###### a. Sejarah Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kota dimana masih termasuk dalam wilayah provinsi Jawa Timur. Dengan berdasar pada pasal dua pada Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 22/Tap/Kdh/1973 yang dikeluarkan pada 12 september 1973 dinyatakan bahwa hari jadi mengenai kabupaten mojokerto masih bersifat sementara, namun pada masa kepemimpinan Bupati Mojokerto bernama H. Mahmoed Zain, SH, MSi maka dimulailah berbagai upaya untuk mencari dan menelusuri hari jadi kabupaten mojokerto. Upaya pendekatan tersebut antara lain :

a. Pada tanggal 20 agustus 1991 dilaksanakan “Seminar Sehari” dengan tema “Kabupaten Mojokerto Menyongsong Hari Esok”.

b. Pada tanggal 8 September 1992, dilaksanakan simposium menyongsong Tujuh Abad Mojopahit yang dihadiri oleh Sekjen Depdagri, Gubernur, Javanologi Surabaya, pakar-pakar sejarah baik dari Kabupaten Mojokerto sendiri maupun dari luar daerah.

- c. Pembentukan Tim Penelitian Sejarah dengan mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 438 Tahun 1992 tentang pembentukan Tim Penulisan Sejarah Mojokerto.

Dengan melihat rentetan peristiwa yang telah terjadi maka dapat ditetapkan 8 (delapan) alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai Hari Jadi Mojokerto yaitu:

- a. Pertemuan antara Perdana Menteri Mojopahit, Shi nan da cha ya dengan Shih pi yakni panglima tertinggi pasukan Tar-Tar, dapat dipandang sebagai wujud pengakuan diplomatik atas Negara berdaulat dalam rangka kerjasama internasional untuk menyerang Doho. Hal ini dapat mengacu pada tanggal 1 bulan ke-3 kalender Tarikh Cina atau bisa dikatakan tanggal 8 April 1293.
- b. Pada saat Raden Wijaya mulai mengatur strategi untuk melawan pasukan Tar-Tar, ia memperoleh izin dari Kediri ke Mojopahit pada tanggal 2 bulan Ke-4 Tarikh Cina. Titik waktu ini merupakan titik awal kemenangan diplomatik dan militer dipihak Raden Wijaya, karena setelah itu kemudian secara bertahap Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Tar-Tar. Dalam Tarikh Masehi peristiwa tersebut adalah tanggal 9 mei 1293.
- c. Titik waktu tentara mojopahit memperoleh kemenangan total terhadap pasukan Tar-Tar. Dalam hal ini mengacu pada keputusan pimpinan pasukan Tar-Tar untuk meninggalkan Pat-Shich pada tanggal 24 Bulan ke-

4 dalam kalender Tarikh Cina atau pada tanggal 31 Mei 1293. Namun titik waktu ini digunakan oleh kota Surabaya sebagai hari jadinya.

- d. Titik waktu penobatan Raden Wijaya sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Harsa Wijaya atau titik waktu penerbitan Prasasti Gunung Botak.
- e. Dari Khasanah Kidung, juga menunjukkan terjadinya peristiwa penting dalam sejarah Mojopahit.
- f. Dari khasanah prasasti juga ditemukan titik waktu peristiwa yang erat kaitannya dengan sejarah Mojopahit. Kidung Harsa Wijaya menyebutkan bahwa Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja terjadi pada tanggal 12 November 1293. Titik waktu ini kemudian dikenal sebagai Hari Mojopahit, Prasasti Gunung Botak yang diterbitkan pada tanggal 11 september 1294 memberitakan secara panjang lebar riwayat Rajakuta Mojopahit.
- g. Perjanjian Gianti yang ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 1755.
- h. Saat ditanda tangani penyerahan kabupaten Japan pada tanggal 1 Agustus 1812 oleh kesultanan Jogjakarta kepada Pemerintah Inggris di Jawa.

Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan yang sangat panjang pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto, mengenai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto maka disepakatilah Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang tepat pada tanggal 9 Mei 1293 Masehi, yang semua itu terdapat pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 09 Tahun 1993 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 1993. Selanjutnya Bupati selaku Kepala Daerah yang saat itu dijabat oleh H. Mahmoed Zain, SH, Msi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor :



230 Tahun 1993 yang disepakatilah tanggal 9 Mei 1993 sebagai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan dengan tidak berlakunya Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 22/TAP/Kdh/1973 Tentang Penetapan Sementara Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, maka akhirnya menjadi tanggal 09 Mei 1293 Masehi yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto.

b. Keadaan Geografis dan Topografis Kabupaten Mojokerto

Wilayah Kabupaten Mojokerto adalah suatu wilayah dimana masih dalam Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47'30" Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 969.360 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Jika ditinjau wilayah Kabupaten Mojokerto seluas 969.360 Km<sup>2</sup> dipergunakan secara bermacam-macam meliputi :

✓ Pemukiman	: 132,440 Km <sup>2</sup>
✓ Pertanian	: 371,010 Km <sup>2</sup>
✓ Hutan	: 289,480 Km <sup>2</sup>
✓ Perkebunan	: 170, 000 Km <sup>2</sup>
✓ Rawa/waduk	: 0,490 Km <sup>2</sup>
✓ Lahan Kritis	: 0,200 Km <sup>2</sup>
✓ Padang Rumput	: 1,590 Km <sup>2</sup>
✓ Semak/Alang-alang	: 0,720 Km <sup>2</sup>

*Sumber: RKPD Kabupaten Mojokerto 2013*

Secara Geografis juga Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

*Sumber: RKPD Kabupaten Mojokerto 2013*

Disamping itu selain berbatasan dengan wilayah kabupaten yang ada diatas, Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di Tengah-Tengah Wilayah Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya mengenai Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan bagian pegunungan yang subur, meliputi kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur dan hanya dimanfaatkan sebagai pertambangan.

**Tabel 2**

**Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Tinggi Rata – Rata dari Permukaan Laut ( m )</b>	<b>Luas Daerah *) ( Km<sup>2</sup> )</b>
<b>1</b>	Jatirejo	140	107,62
<b>2</b>	Gondang	240	98,62
<b>3</b>	Pacet	570	107,98
<b>4</b>	Trawas	800	58,00
<b>5</b>	Ngoro	25	70,50
<b>6</b>	Pungging	30	45,00
<b>7</b>	Kutorejo	500	43,50

No	Kecamatan	Tinggi Rata – Rata dari Permukaan Laut ( m )	Luas Daerah *) ( Km <sup>2</sup> )
8	Mojosari	36	28,85
9	Bangsals	30	25,84
10	Mojoanyar	23	23,37
11	Dlanggu	17	35,82
12	Puri	70	34,65
13	Trowulan	40	45,93
14	Sooko	64	19,30
15	Gedeg	26	26,18
16	Kemlagi	22	42,35
17	Jetis	35	53,05
18	Dawarblandong	75	102,80
	Kab. Mojokerto	30	969,36
Keterangan :			
*) Luas Daerah termasuk hutan Negara			

(Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2011)

Sekitar 30 % dari wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki kemiringan tanah lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat. Pada umumnya ketinggian di wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan hanya



Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah ketinggian lebih dari 700 meter diatas permukaan laut. Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 229 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan adalah 969,360 Km<sup>2</sup>, untuk perinciannya tersebut dapat dilihat dari tabel yang ada diatas.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena disamping menjadi obyek pembangunan penduduk sekaligus menjadi pelaku pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah penduduk yang ada disuatu daerah. Beberapa metode dipakai dalam menghitung jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto, diantaranya adalah melalui Sensus Penduduk, Survei Kependudukan, Registrasi Penduduk dan Penghitungan Kepadatan Penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 sebesar 1.112.821 jiwa. Dari data yang ada, pertumbuhan penduduk rata-rata dalam 3 tahun terakhir mencapai 4,02 %. Jumlah penduduk dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 3****Jumlah Penduduk Tahun 2009-2011**

	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Jumlah Penduduk	1.070.579	1.088.632	1.112.821
Laki	538.115	547.322	559.793
Perempuan	532.464	541.310	553.028

*Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto 2011*

Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dalam tahun 2011 jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Mojokerto sebesar 559.793 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 553.028 jiwa. Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut jenis kelamin untuk tiap kecamatan.

**Tabel 4****Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki – Laki	Perempuan	
1.	JATIREJO	21.741	21.266	43.007
2.	GONDANG	21.852	21.642	43.494
3.	PACET	29.092	29.042	58.134
4.	TRAWAS	15.172	15.214	30.386

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki – Laki	Perempuan	
5.	NGORO	39.576	39.641	79.217
6.	PUNGGING	38.062	37.676	75.738
7.	KUTOREJO	31.971	31.251	63.222
8.	MOJOSARI	39.768	38.753	78.521
9.	DLANGGU	28.000	27.800	55.800
10.	BANGSAL	25.963	25.360	51.323
11.	PURI	37.676	37.156	74.832
12.	TROWULAN	38.043	37.249	75.292
13.	SOOKO	38.148	37.336	75.484
14.	GEDEG	30.938	30.499	61.437
15.	KEMLAGI	29.992	29.970	59.962
16.	JETIS	42.555	41.934	84.489
17.	DAWARBLANDO NG	25.972	26.614	52586
18.	MOJOANYAR	25.272	24.625	49.897
JUMLAH		559.793	553.028	1.112.821

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2011



## 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Lembaga yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jln. Mojopahit No. 582 Kabupaten Mojokerto. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terlihat seperti kantor-kantor pemerintah yang lain. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terletak di sebelah selatan pusat Kota Mojokerto, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Mojokerto



**Gambar 3: Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

*Sumber : dokumentasi penulis (2014)*

Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai situs penelitian karena dinas inilah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM kerupuk rengginang. Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto melakukan pemberdayaan kepada usaha-usaha kecil yang kegiatan produksinya yaitu mengolah bahan baku/bahan dasar menjadi suatu produk baru. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terhadap industri-industri kecil baik industri

rumah tangga, industri kecil menengah dan industri besar adalah bertujuan agar industri tersebut dapat mengembangkan dan memperanekaragaman produknya.

Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto lebih kepada bantuan peralatan dan teknologi karena usaha industri adalah suatu usaha yang kegiatan produksinya dengan melakukan pengolahan. Maka dari itu, potensi yang dimiliki industri kecil dalam mengembangkan usahanya sangat luas karena dengan pemberdayaan dan pembinaan yang baik maka suatu industri kecil dapat mengembangkan usahanya dengan menginovasi produknya sehingga menciptakan suatu produk baru di pasar sehingga peluang untuk memperluas pemasaran semakin terbuka.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 dijelaskan tentang pembagian tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Dalam Bab I dijelaskan bahwa

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
- 2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 4) Bupati adalah Bupati Mojokerto
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.



- 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
- 7) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Dengan susunan organisasi terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang yang meliputi: Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, mempunyai tugas meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengintegrasian kegiatan administrasi tingkat internal bagian sekretariat dan bidang bina perindustrian dan perdagangan
- b. Memberikan bimbingan, petunjuk, pengawasan serta penilaian pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya.



- c. Pelaksanaan tugas-tugas dibidang organisasi tata laksana dan peningkatan aparatur pemerintah di lingkungan dinas.
  - d. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
2. Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka, tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif.
- Bidang Bina industri Logam, Mesin, Aneka Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika membawahkan dan mengkoordinasikan :
- a. Kegiatan operasional bidang industri logam, mesin, aneka tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika (ILMATET).
  - b. Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi, dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan

teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun.

- c. Penetapan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing Seksi industri.
- d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Seksi industri Logam dan Mesin mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama di bidang industri logam dan mesin.
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi Berita Acara Penerimaan (BAP) dan Rekomendasi terhadap setiap penerbitan ijin industri yang diterbitkan di kabupaten.
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri logam dan mesin.
- d. Menyiapkan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), Seksi Bimbingan Logam dan Mesin.

**a) Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto**

**a. Visi**

Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 yakni :

**“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah industri dan perdagangan yang maju, tangguh, berdaya saing tinggi di pasar lokal atau internasional”**

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

**1) Industri dan perdagangan yang maju**



Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah industri yang sudah berkembang dan tangguh karena didukung oleh sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang kualified serta didukung oleh tumbuh dan berkembangnya kawasan industri yang menghasilkan produk-produk yang berorientasi pasar lokal dan ekspor, berbasis teknologi tinggi serta ditopang oleh industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat berbasis sumber daya daerah yang potensial dan teknologi tepat guna. Terwujudnya kabupaten mojokerto sebagai daerah perdagangan yang maju dengan sarana dan prasarana perniagaan seperti pasar tradisional yang bersih sehat, aman dan nyaman serta merata disetiap wilayah kecamatan; pusat grosir dan produk-produk unggulan yang representatif dan mudah dijangkau pedagang eceran serta toko dan pasar modern (waralaba) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Tangguh, Berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.

Terwujudnya kabupaten mojokerto sebagai daerah industri yang tangguh karena didukung oleh sumber daya alam yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga produktifitas akan selalu meningkat pada situasi dan kondisi perekonomian yang bagaimanapun juga. Dukungan dari IKM yang kuat di daerah-daerah sebagai tulang punggung perekonomian daerah juga sebagai pendukung pengawasan untuk menyerap tenaga kerja yang belum tertampung di sektor industri formal. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang berdaya saing tinggi yang menghasilkan

produk yang berkualitas, harga yang kompetitif sesuai dengan tuntutan pasar lokal maupun pasar global yang dihasilkan melalui proses industri yang efektif, efisien dan produktifitas yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu berperan dan yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang baik. visi yang dimaksud adalah sebagai wilayah industri yang sudah mulai berkembang yang harus bertumpu pada potensi dalam sumber daya daerah maka diharapkan mempunyai struktur industri yang kokoh, kuat, dan maju serta berdaya saing tinggi, juga bertumpu pada sumber daya industri yang berkualitas serta makin mampu memanfaatkan teknologi yang tinggi. Dan sebagai wilayah niaga yang tangguh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu tiang penunpu Pemerintah Kabupaten Mojokerto, harus mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang dan kondisi global sehingga mampu juga bersaing baik di Pasar Dalam Negeri maupun Pasar Luar Negeri. Daerah industri dan perdagangan yang maju adalah Kabupaten Mojokerto memiliki Lembaga dan pranata ekonomi yang telah tersusun, tertata dan berfungsi secara baik, sektor industri dan perdagangan yang terus berkembang, produk domestik regional bruto (PDRB) yang tinggi dan semakin meningkat (Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto 2011-2015)

#### b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing industri dan pasar lokal melalui bimbingan penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses serta hasil produksi industri.
- 2) Mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik lokal, regional, nasional dan internasional.
- 3) Meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representatif dengan meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar.
- 4) Meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan.

#### b) Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

##### a. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna. Berdasarkan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :



1. Untuk mewujudkan misi meningkatkan daya saing industri dan pasar lokal melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses serta hasil produksi industri maka ditetapkan tujuan yaitu mendorong perekonomian kegiatan usaha Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menerapkan TTG (teknologi tepat guna) serta meningkatkan produktifitas dan kualitas SDM pengusaha IKM.
2. Untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik lokal, regional, nasional dan internasional maka ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen dan meningkatkan kegiatan promosi hasil-hasil produksi industri daerah Kabupaten Mojokerto di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
3. Untuk meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representatif dengan meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM ) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar maka ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kenyamanan bertransaksi, mengembangkan kerjasama usaha yang sinergis antara usaha mikro, usaha kecil menengah dengan pembinaan usaha yang saling menguntungkan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

4. Untuk meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan maka ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kedisiplinan, pengetahuan dan wawasan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, tertib administrasi perkantoran yang didukung dengan sarana yang layak serta meningkatkan pengaturan laporan rutin setiap tahun.

**b. Sasaran**

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 “meningkatkan daya saing industry besar dan pasar lokal melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses dan hasil produksi” maka ditetapkan sasaran: terwujudnya IKM, sentra-sentra industry kecil dan kelompok industri kecil nonformal yang beralih teknologi ke TTG sehingga terwujud hasil industri yang mempunyai standar produk (SNI)
2. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 2 “mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat, terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik lokal, regional, nasional dan internasional” maka

ditetapkan sasaran: terwujudnya kegiatan pengawasan dan penindakan distribusi barang dan jasa yang wajib SNI serta meningkatkan perluasan pangsa pasar.

3. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 3 “meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representatif dengan meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa di pasar” maka ditetapkan sasaran: terwujudnya sarana penunjang kenyamanan bertansaksi di pasar yang akan mewujudkan peningkatan PAD tiap tahun.
4. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 “meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan” maka ditetapkan sasaran: pertama, terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Kedua, terwujudnya peningkatan kinerja melalui tersedianya sarana dan prasarana.

### **3. Gambaran Umum Situs Penelitian**

#### **a. Lokasi**

Desa Sawahan merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi usaha ini adalah :

- 1) Lokasi Yang Strategis



Lokasi dari Desa Sawahan yang berada di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto merupakan sangat strategis dalam menunjang kegiatan usaha karena berdekatan dengan daerah-daerah Industri .

2) Tenaga Kerja yang memadai

secara kualitas dan kuantitas dapat terpenuhi karena daerah sekitar lokasi usaha ini tersedia tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.

**b. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Sawahan Kecamatan Mojosari sebanyak 2956 Jiwa yang terdiri dari 901 KK (Kepala Keluarga), yang meliputi :

Laki-Laki :1457 Jiwa

Perempuan : 1499 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga: 798

*Sumber : Desa Sawahan Kecamatan Mojosari 2014*

**c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto**

Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi di suatu desa dengan struktur ekonomi yang diharapkan, maka pembangunan perlu direncanakan dengan baik dan hasil pembangunan yang telah tercapai perlu adanya evaluasi yang baik dari pemerintah yang ada.

Kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat berkaitan erat dengan sumber pendapatan masyarakat yang ada di desa tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan maju atau terbelakang terlihat dari tingkat perekonomian dan kesejahteraan dari

masyarakatnya. Dari segi perekonomian, penduduk Desa Sawahan ini terbagi atas berbagai mata pencaharian antara lain terdapat dalam tabel 4

**Tabel 5**

**Keadaan Perekonomian/Mata Pencaharian Tahun 2013**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	150
2.	Pedagang	180
3.	Buruh	339
4.	PNS	27
5.	TNI	1
6.	Polri	1
7.	Karyawan Swasta	525
8.	Seniman	2
9.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	15
10	Montir	4
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10
12	Pengusaha Kecil dan Menengah	15
13	Lain – Lain	90

*Sumber : Data Desa Sawahan Kecamatan Mojosari 2014*

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar warga Desa Sawahan bekerja swasta. sedangkan dibidang usaha kecil terutama para pengusaha industri kerupuk

rengginang belum begitu banyak namun dengan adanya usaha kerupuk rengginang dan melihat tingginya potensi yang dapat dihasilkan salah satunya mampu menyerap tenaga kerja. Hal tersebut tampak dari semakin meningkatnya jumlah industri baik yang kecil maupun industri rumah tangga.

**Tabel 5**  
**Status Kepemilikan Industri**

Status Kepemilikan	Industri	Jumlah
Pemilik	Industri Kecil	15
	Industri Rumah Tangga	18
Buruh	Industri Kecil	70
	Industri Rumah Tangga	35

*Sumber : Data Desa Sawahan Kecamatan Mojosari*

#### **d. Awal Mula Desa Sawahan Sebagai Sentra Usaha Rengginang**

Desa Sawahan terletak di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan telah lama dikenal sebagai daerah sentra usaha kerupuk rengginang yang ada di Mojokerto. Mula-mula Usaha rengginang di Desa Sawahan mulai dirintis sejak tahun 1970an oleh Ibu Mariyam kemudian dibantu oleh Ibu Saripah namun setelah beberapa tahun Ibu Saripah yang merupakan ibu dari Ibu Umi mencoba untuk membuat kerupuk rengginang sendiri dalam masa merintis usaha ibu saripah tidak begitu pesat, dalam perkembangan industri kerupuk rengginang pada tahun tersebut



masih ada beberapa pengusaha salah satunya adalah Ibu Mariyam dan Ibu Seripah tapi setelah ibu saripah meninggal kemudian Ibu Umi meneruskan usaha ibunya tepatnya pada tahun 1997.

Pada tahun 1997 pengusaha kerupuk rengginang mulai bermunculan seiring dengan ditemukannya rengginang berukuran kecil oleh Ibu Umi yang pada waktu itu sangat digandrungi oleh orang-orang dari luar kota mereka banyak yang mencari rengginang yang ukurannya kecil sehingga banyak masyarakat dikelurahan sawahan tertarik untuk membuat rengginang namun setelah adanya krisis pada tahun 1999 para pengusaha yang mampu bertahan hingga sampai sekarang hanya berjumlah kurang lebih 10 orang.

## **B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian**

### **1. Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)**

Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tingkat pembangunan daerah. Dalam kaitan dengan penulisan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dibantu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya mengembangkan potensi yang ada di daerah melalui progam pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga merupakan salah satu bentuk pengamalan terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam wujud upaya pengembangan potensi daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memiliki visi yakni “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah industri dan perdagangan yang maju, tangguh, berdaya saing tinggi di pasar lokal atau internasional” hal tersebut di perkuat dengan pernyataan Ibu Ani selaku Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto:

“Secara umum peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini sebagai fasilitator yakni melakukan pembinaan kemudian mengarahkan mereka supaya bisa berkembang, mandiri, dan kemudian bisa bersaing dengan usaha lain ditingkat kabupaten, regional bahkan ditingkat nasional dengan beberapa progam yang sifatnya pemberdayakan”. (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Imron selaku Kepala Bidang Bina Industri Kimia dan Agro di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto:

“Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini sebagai instansi yang menaungi pengusaha kerupuk rengginang hanya pendamping yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap proses perkembangan usaha kecil yang ada di Kabupaten Mojokerto. Untuk mewujudkan semua itu maka perlu diadakan adanya pembinaan dan pelatihan melalui workshop dan penyuluhan”. (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

Dalam uraian tersebut upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat mutlak diperlukan dalam proses pemberdayaan khususnya terhadap para pengusaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari

Kabupaten Mojokerto. Pemerintah merupakan pelindung dari usaha kecil menengah maka dari itu pemerintah wajib memberikan arahan serta dorongan baik materil maupun moril mengingat usaha kecil menengah ini merupakan salah satu tulang punggung dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya pemberdayaan berkelanjutan untuk jangka panjang sehingga nantinya diharapkan mampu berkembang mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan mampu bersaing di pasar internasional serta mengangkat perekonomian Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki sejumlah tugas masing-masing dalam menjalankan fungsinya yang nantinya mampu melaksanakan percepatan pemberdayaan UKM. Dari sebagian besar tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tersebut adalah sebagai fasilitator dan membantu pembinaan para pengusaha kerupuk rengginang untuk meningkatkan produknya hingga bisa bersaing di pasaran. Dengan demikian Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan proses upaya pemberdayaan usaha kerupuk rengginang meliputi:

**a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Maju tidaknya sebuah usaha tergantung dari bagus tidaknya sumber daya manusia, keberadaan sumber daya manusia penting dalam perkembangan dan kemajuan usaha rengginang. Selama ini kualitas SDM



yang ada pada industri rengginang bisa dikatakan masih rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar pelaku usaha industri kecil rengginang. Hal tersebut berdampak pada minimnya kemampuan mereka dibidang pengelolaan industri itu sendiri, baik dalam hal menejemen produksi, manajemen keuangan, serta dalam mengatur pemasaran produk. Hal tersebut di ungkapkan oleh Ibu Umi selaku pemilik usaha kerupuk rengginang Moro Seneng:

“Kebanyakan para pengusaha dan karyawan yang bekerja di sentra industri kerupuk rengginang di desa sawahan tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi paling banyak adalah lulusan SMP dan SMA, menurut saya dalam menjalankan industri kerupuk rengginang tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi namun hanya bermodal kerja keras dan keuletan saja. Tapi meskipun demikian kadang ada permasalahan-permasalahan berkenaan dengan tenaga kerja yakni sering ada karyawan yang kurang mau diajak kerjasama khususnya kalau waktu lagi ramai seperti mau mendekati hari raya namun demikian tidak menjadi hambatan karena saya bisa mencari tambahan karyawan lagi” (wawancara hari sabtu 5 Juli 2014)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa mayoritas pendidikan para pengusaha dan karyawan di sentra industri kerupuk rengginang Desa Sawahan Kecamatan Mojosari masih tergolong sangat rendah kebanyakan dari mereka hanya menamatkan pendidikan SMP dan SMA. Kondisi demikian membuat para pengusaha kesulitan dalam mempengaruhi para karyawan supaya bisa diajak kerjasama. Hal demikian di diperkuat dengan masih adanya beberapa karyawan yang tidak bersedia melakukan tambahan jam kerja (lembur). Namun demikian tidak

mempengaruhi dalam pembuatan kerupuk rengginang karena dalam pembuatan rengginang para pelaku usaha langsung mencari tenaga kerja baru. Dalam proses pembuatan kerupuk rengginang juga banyak pengusaha dan karyawan sudah mengetahui bagaimana proses dalam pembuatan kerupuk rengginang, proses yang dilakukan dalam pembuatan rengginang seperti pada umumnya tetapi yang membedakan dalam setiap pengusaha ada pada resepnnya.

Minimnya kualitas sumberdaya manusia pada usaha industri rengginang menjadi salah satu sasaran progam pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya industri kecil rengginang di Desa Sawahan. Kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto itu adalah memberikan pembinaan dan pelatihan melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung kepada pengusaha secara kontinyu dan jika mereka membutuhkan informasi atau keterangan-keterangan dapat langsung menghubungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. seperti yang diungkapkan oleh ibu Ani selaku Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa:

“Dalam upaya pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pemberdayaan diantaranya progam yang pertama kali kita

lakukan dulu adalah dengan melakukan pelatihan tentang peningkatan managerial pemasaran yang dilakukan oleh petugas TPL mereka dibina bagaimana caranya mencari segmen pasar yang potensial kemudian juga diajarkan bagaimana cara meningkatkan kualitas kemasan produk di antaranya mereka kita latih untuk membuat kemasan yang baik, baik dari sisi tampilan biar enak dilihat kemudian dari sisi regulasi standarnya pencantuman di label itu apa aja. kemudian standart higienitas bahan-bahan yang baik untuk kemasan itu apa saja kita berikan disana waktu itu pelatihan dilaksanakan pada tahun 2012 di balai desa Sawahan yang pada waktu itu dihadiri oleh pengusaha dan ibu PKK. Selain dengan melakukan pelatihan kami juga meakukan penyuluhan biasanya kami langsung mendatangi rumah para pengusaha disana kami melakukan sharin-sharing berkenaan dengan usaha, kami juga memberiwawasan tentang bagaimana cara meningkatkan mutu dan kapasaitas kerupuk rengginang yang akhirnya bisa menjadi baik” (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

Pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan. Adapun pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada usaha kecil menitikberatkan antara lain:

- 1) Mengadakan workshop dengan materi peningkatan menejerial pemasaran bertujuan agar produk krupuk rengginang semakin diminati oleh konsumen.
- 2) Mengadakan penyuluhan bimbingan terkait memberi wawasan tentang bagaimana cara meningkatkan mutu dan kapasaitas kerupuk. (Sumber: diolah dari hasil wawancara dari Ibu Ani selaku Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)



Berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia tersebut maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kerupuk rengginang sehingga diharapkan nanti bisa bersaing dipasaran regional maupun nasional yang kondisi saat ini masih sering berubah-ubah. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh bapak Ali Imron selaku Kepala Bidang Bina Industri Kimia dan Agro di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto:

“Bawasannya pembinaan terhadap industri kecil menengah sering kami lakukan mulai dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. Khususnya dalam industri kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selain melakukan pelatihan kami juga melakukan penyuluhan yang langsung kami datang satu per satu secara bergiliran kegiatan tersebut sudah kita mulai pada tahun 2012 pada bulan Agustus” (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

Perlunya pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia ini dinilai dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pengusaha kerupuk rengginang karena akan memunculkan kreatifitas, dan inovasi dan kemauan yang besar dalam mengembangkan usaha kecilnya agar bisa tumbuh lebih maju dan memiliki daya saing yang kuat karena seperti yang kita ketahui kerupuk rengginang merupakan makanan tradisional yang kurang diminati. Dengan adanya pelatihan tentang pemasaran dan pengemasan diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksinya dan banyak diminati oleh pasar selain itu juga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dengan manajemen yang baik. pembinaan

yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk menambah wawasan dari pengusaha kerupuk rengginang seperti yang diungkapkan oleh Ibu Umi selaku pengusaha industri kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto:

“Dulu pernah diadakan pelatihan di balai desa Sawahan saya pada waktu itu hadir beserta beberapa karyawan saya yang diikuti pula oleh sebagian warga sekitar dalam pelatihan tersebut juga di berikan penjelasan bagaimana cara melakukan pengemasan yang baik dan bagaimana cara pemasaran selain itu Disperindag telah melakukan penyuluhan mereka dengan mendatangi tempat saya dalam penyuluhan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan pengertian supaya produk makanannya tidak dicampur dengan bahan pengawet kadang saya juga melakukan curhat-curhat berkenaan dengan proses produksi krupuk rengginang”. (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Dalam upaya pemberdayaan berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan dengan mengadakan workshop dan penyuluhan. Hal demikian juga seperti apa yang telah di ungkapkan oleh Bapak Irfan Efendi selaku pengusaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan merek Ila Makmur:

“Dulu pernah diadakan workshop oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto namun yang hadir adalah istri saya dalam workshop tersebut istri saya dikasih peralatan penunjang produksi. Tidak hanya workshop Dinas Perindustrian juga melakukan penyuluhan dengan mendatangi pabrik saya, dalam penyuluhan tersebut Disperindag memberi saya pengertian berkenaan dengan pengemasan produk yang baik” (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)



**Gambar 4: Kemasan Kerupuk Rengginang Siap Jual**



*Sumber : Dokumentasi Penulis (2014)*

Hasil wawancara dengan pengusaha rengginang salah satu hasil dari adanya worksop adalah semakin bagus dalam sisi pengemasan dimana sudah menggunakan plastik yang bagus dan adanya stiker didalamnya hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto benar-benar melakukan pembinaan dengan melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan melalui terjun secara langsung ke lapangan untuk memberikan wawasan dalam perbaikan produk dan peningkatan managerial pemasaran dan pendampingan terhadap kemasan produk sehingga industri makanan tradisonal bisa dapat dilestraikan dan mampu memiliki daya saing yang tinggi di pasaran.



#### **b. Bantuan Sarana-Prasarana Penunjang Peroduksi**

Pembinaan lain yang berhubungan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pemberian bantuan peralatan penunjang produksi, seperti alat penjemur rengginang, kompor, dandang, dan mesin pengepres bungkus makanan. Berikut pernyataan dari Ibu Ani Selaku Kepala Seksi Bidang Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan bantuan peralatan penunjang produksi rengginang:

“Bantuan peralatan yang pernah diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto kepada pengusaha rengginang di Desa Sawahan ialah alat penjemur rengginang, kompor, dandang, dan mesin pengepres bungkus makanan. Pemberian ini merupakan dalam rangka bentuk mekanisasi alat produksi yang sebelumnya manual yang biasanya satu jam bisa ngerajang satu kilo dengan adanya alat Teknologi Tepat Guna (TTG) satu jam bisa ngerajang 3kg. pemberian diberikan saat waktu pelatihan pada tahun 2012 selain pada waktu itu mengadakan pelatihan pemerintah melalui disperindag juga memberikan bantuan sarana-prasarana penunjang produksi”. (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

Dengan diberikannya sarana-prasarana oleh Disperindag maka diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari pengusaha industri kecil menengah kerupuk rengginang, sehingga diharapkan bisa mampu memenuhi pasar regional dan nasional. Hal senada juga di ungkapkan oleh Ibu Umi selaku pengusaha kerupuk rengginang:

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memberikan saya peralatan untuk menunjang produksi seperti mesin pengepres kemasan makanan, alat penjemur yang terbuat dari bambu, dan kompor”. (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Irfan Efendi selaku pengusaha kerupuk rengginang merek Ila Makmur:

“Sebelum diberikan bantuan alat pengemasan bungkus makanan saya dulu masih melakukan proses pembungkusan secara manual dengan bantuan lilin tetapi setelah adanya bantuan alat pengemasan, kemasan produk saya terlihat bagus dan baik namun alat yang sudah diberikan oleh Disperindag kini sudah rusak” (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Pemberian mesin pengepres kemasan pada pengusaha sangat membantu dalam proses peningkatan daya saing karena sebelum diberikan bantuan para pengusaha masih manual dengan menggunakan lilin mesin tetapi setelah adanya bantuan mesin tersebut kemasan yang dihasilkan lebih rapi alat tersebut seperti pada gambar dibawah.

**Gambar 5: Mesin Pengemas Kerupuk Rengginang**



*Sumber: Dokumentasi Penulis (2014)*



Dari kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain melakukan pelatihan juga memberikan bantuan berupa sarana-sarana penunjang dalam proses produksi sehingga apa yang dilakukan Disperindag sangat membantu dalam pengembangan dan peningkatan daya saing usaha kerupuk rengginang yang ada di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

### c. Kemudahan Pengurusan Perizinan

Melihat perkembangan pasar yang makin hari makin tidak bisa ditebak dan masyarakat sudah semakin selektif dalam memilih produk yang harus dibeli, maka pengusaha rengginang harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut ditambah kerupuk rengginang merupakan olahan tradisional. Fakta tersebut bisa dilihat dari adanya sebagian industri rengginang di Desa Sawahan yang mendaftarkan produknya pada Dinas Kesehatan supaya bisa mendapatkan izin kelayakan makanan dan minuman dari dinas terkait. Masyarakat kurang yakin akan kehygienisan produk rengginang apabila tidak memiliki izin edar maka dari itu masyarakat akan lebih percaya jika produk rengginang tersebut mendapat izin dari Dinas Kesehatan. Berikut pernyataan dari Ibu Umi, selaku pemilik usaha rengginang merek Moro Seneng:

“Untuk menjaga usahannya agar tetap bisa berlangsung saya bekerja keras salah satunya dengan mendaftarkan merek produk saya pada Dinas Kesehatan untuk mendapatkan ijin dari dinas tersebut. Jauh sebelum itu usaha saya sudah saya daftarkan pada Disperindag untuk mendapatkan surat izin usaha. Dan dengan surat izin usaha itulah saya



mendaftarkan produk saya ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pengetesan apakah produk saya layak atau tidak beredar dipasaran, dengan usaha yang saya lakukan kini terjadi peningkatan permintaan seperti datang dari Pasuruan, Malang, Surabaya, Kalimantan, Jakarta dsb”. (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Hal senada juga disampaikan oleh Imam sayahroni selaku pengusaha rengginang merek Barokah sebagai berikut:

“Dengan saran dari Disperindag, saya mendaftarkan usaha saya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha dan hasilnya setelah mendaftarkan penjualan kerupuk rengginang saya naik, beberapa rumah makan dan pusat oleh-oleh telah mengambil produk krupuk saya” (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Dengan melakukan pengurusan perizinan usaha dan merek dagang banyak hal yang dapat diperoleh salah satunya dengan peningkatan omset dan secara otomatis memberikan tambahan penghasilan kepada para pengusaha. Hal tersebut juga di disampaikan oleh Ibu Ani Selaku Kepala Seksi Bidang Industri, Makanan, Minuman, dan Tembakau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto:

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mendorong penuh untuk melakukan perizinan karena mereka UKM dibidang pangan, maka yang mereka lakukan adalah paling utama adalah ijin edar pangan itu namanya PIRT dan perizinan mengenai Industrinya TDI SIUP namun masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan usahanya ini dikarenakan kurangnya kesadaran mereka padahal kami sudah mencoba untuk memberikan pengertian” (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

Dari wawancara demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan dalam hal perizinan telah melakukan pendampingan dalam pengurusan perizinan usaha, tetapi

masih ada beberapa pengusaha yang belum melakukan perizinan hal ini dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya melakukan perizinan sebuah usaha.

#### **d. Promosi dan Pemasaran**

Promosi dan pemasaran merupakan bagian yang paling terpenting dari sebuah usaha produksi karena selain dari segi kualitas dan kuantitas, faktor pemasaran sangat menentukan dalam sebuah penjualan. Selama ini promosi kerupuk rengginang masih dari mulut ke mulut dan dalam proses pemasarannya masih sederhana yakni para konsumen mengambil kerupuk rengginang di ditempat produksi tetapi kadang juga ada yang diantar. Untuk meningkatkan akses pada pasar maka pentingnya adanya promosi dan pemasaran yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Disperindag mencoba untuk melakukan strategi-strategi pemasaran seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Ani Selaku Kepala Seksi Bidang Industri, Makanan, Minuman, dan Tembakau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto:

”Bahwa selain dilatih strategi dalam manajemen pemasaran seperti penentuan harga, dan bagaimana menjaring konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto juga melakukan promosi dengan mengajak pengusaha untuk melakukan pameran dalam daerah Jawa Timur yang sekalannya regional atau yang sekalannya nasional, yang pernah sekala nasional adalah pameran di Kalimantan dengan manfaat adanya promosi ini dapat dikenal kemudian mempertemukan antara pembeli diluar pulau dengan pengusaha kerupuk rengginang. Adanya promosi ini juga menuju adanya AFTA 2015 arahannya akan seperti itu, kalau Kabupaten

Mojokerto sendiri menjadikan industri kecil yang mandiri, kokoh, dan berdaya saing tinggi ” (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

Ibu Ani menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pemasaran dan promosi usaha kecil kerupuk rengginang terhadap pasar adalah membuka dan memperluas akses pemasaran dengan melakukan promosi melalui mengikutsertakan produk pengusaha krupuk rengginang dalam pameran produk unggulan daerah yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dengan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah lain. Pameran tersebut bertujuan untuk menarik minat konsumen tidak hanya di wilayah Mojokerto yang sekalannya lokal tetapi bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga mampu meningkatkan pendapatan pengusaha krupuk rengginang. Upaya pemerintah khususnya dinas yang bersangkutan dalam melakukan promosi mendapat respon dari pengusaha salah satunya dari Ibu Umi selaku pengusaha Kerupuk Rengginang merek Moro Seneng:

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada waktu dulu telah mengajak saya untuk ikut pameran tetapi karena adanya kerepotan-kerepotan berkenaan dengan pekerjaan yang ada di rumah saya tidak ikut tetapi produk saya di bawah kalau tidak salah diikuti dalam pameran. efek secara langsung pada waktu dulu memang belum terasa tetapi setelah beberapa bulan ada orang yang mencari-cari produk rengginang kecil-kecil yang berasal dari luar kota mungkin saja yang mencari rengginang kecil buah hasil dari promosi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)



Berdasarkan hasil wawancara antara pengusaha kerupuk rengginang dan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah melakukan promosi yang diadakan diberbagai daerah meskipun pada awalnya belum merasakan secara langsung akibat dari promosi tersebut namun setelah beberapa lama produknya bisa dikenal oleh pasaran diluar Mojokerto.

## **2. Keberdayaan UKM Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto**

### **a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengusaha dan Karyawan Kerupuk Rengginang**

Keberadaan industri kecil kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto membawa pengaruh dampak sosial ekonomi bagi kehidupan di masyarakat sekitar khususnya bagi para pengusaha krupuk rengginang. Dimana setelah diadakannya pendampingan melalui progam-progam seperti pelatihan, penyuluhan serta pemberian alat sarana penunjang proses produksi membuat para pengusaha memperoleh pengetahuan dan wawasan sehingga berdampak pada pendapatan mereka mulai bertambah seperti yang diutarakan oleh Ibu Umi:

“Setelah dilakukan pemberdayaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto saya memperoleh pengetahuan dan wawasan seperti dalam hal pengurusan izin usaha dimana sebulum adanya pengurusan izin

pemasaran hasil produksi saya masih wilayah Mojokerto, Surabaya dan sekitarnya tapi setelah di dorong oleh Disperindag untuk mendaftarkannya merek kerupuk saya permintaan semakin meningkat apalagi saat ini dekat dengan hari raya omset penjualan saya lumayan naik kalau dihitung-hitung pendapatan bersih saya sekitar 15jt perbulan tetapi kalau hari-hari biasanya omset saya 5-6 juta. Penghasilan tersebut bisa dikatakan cukup bisa dikatakan tidak karena masih adanya beberapa tanggungan seperti menyekolahkan yang masih kuliah belum membayar cicilan tapi semua pemberian allah kita sukuri saja”. (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Bimbingan serta rahan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat membantu bagi keberlangsungan usaha kecil kerupuk rengginang pernyataan demikian juga didukung oleh Bapak Irfan selaku pengusaha kerupuk rengginang Desa Sawahan:

“Usaha yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan UKM di sentra usaha krupuk rengginang sudah baik. Salah satunya pemberian bantuan alat pengemasan dan pemberian pengertian dalam pendaftaran merek usaha dari apa yang telah dilakukan oleh Disperindag tersebut saya memperoleh manfaatnya dengan berkembangnya produksi saya”. (wawancara pada hari Sabtu 5 Juli 2014)

Melalui hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pengusaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto telah merasakan perubahan setelah adanya pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto karena pembinaan tersebut mampu memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan pengusaha krupuk rengginang. Perubahan yang dirasakan itu antara lain peningkatan taraf pendapatan ekonomi yang bisa dilihat dari gaya hidup. Hal tersebut juga bisa dibuktikan melalui tabel berikut:

**Tabel 7: Data Nilai Investasi dan Nilai Produksi Pada Tahun 2012**

NO	Nama Pemilik	Merek	Nilai Investasi	Produk	Nilai Produksi	Bahan Baku	Penggunaan BB	Nilai BB	Bahan Bakar	Penggunaan B. Bakar
1	Hadi Jalaludin	Gaya Baru	3 Jt	Rengginang	Rp 66,000,000	Ketan	30 Kwintal	##### ###	Gas	720 Kg
2	Yustina	Pari Ketan	2 Jt	Rengginang	Rp 54,000,000	Ketan	30 Kwintal	##### ###	Gas	720 Kg
3	Sriyati	Sumber Rejeki	5 Jt	Rengginang	Rp 66,000,000	Ketan	60 Kwintal	##### ###	Gas	900 Kg
4	Hari Hariyanto	Mekar Jaya	1 Jt	Rengginang	Rp 60,000,000	Ketan	30 Kwintal	##### ###	Gas	1350 Kg
5	Umi Mufidah	Moro Seneng	68 Jt	Rengginang	Rp 27,000,000	Ketan	1500 Kg	##### ###	Gas	45 Kg
6	Asri	Mega Jaya	60 Jt	Rengginang	Rp 27,000,000	Ketan	1500 Kg	##### ###	Gas	45 Kg
7	Kusaeri	Karunia	1 Jt	Rengginang	Rp 9,000,000	Ketan	450 Kg	##### ###	Gas	90 Kg
8	Irfan Efendi	Illa Makmur	1 Jt	Rengginang	Rp 16,000,000	Ketan	12 Kwintal	##### ###	Gas	156 Kg
9	Saturi	Vian Jaya	1 Jt	Rengginang	Rp 27,000,000	Ketan	15 Kwintal	##### ###	Gas	450 Kg
10	Imam Sya'roni	Barokah	5 Jt	Rengginang	Rp 25,200,000	Ketan	12 Kwintal	##### ###	Gas	315 Kg

*Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sudah di Olah (2014)*



### **b. Pemasaran Hasil Usaha**

Perhatian pemerintah terhadap industri kecil sangat diperlukan, mengingat industri kecil dalam keberlangsungannya saat ini memiliki posisi yang vital dimana mereka dituntut untuk mampu bersaing di era persaingan global di sisi lain mereka juga merupakan salah satu tiang pembangunan nasional. Untuk mewujudkan kondisi yang sedemikian maka pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto harus dapat mengoptimalkan potensi usaha kecil yang ada salah satunya adalah melakukan upaya pemberdayaan usaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan yang memiliki potensi dapat menjadi produk unggulan daerah. Untuk mewujudkan semua itu perlu adanya perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait pemasaran hasil usaha sehingga nantinya akan lebih dikenal lagi baik dipasar lokal maupun pasar internasional.

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait pemasaran hasil usaha telah banyak diupayakan salah satunya melalui kerjasama dengan Disperindag daerah lain untuk menyelenggarakan pameran produk unggulan yang pada waktu itu diikuti oleh produk krupuk rengginang salah satunya pengusaha kerupuk rengginang Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, disamping itu juga diadakan pelatihan berkenaan dengan bagaimana cara menjaring konsumen yang potensial. Dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan tersebut adalah konsumen lebih luas tidak

hannya datang dari wilayah Mojokerto dan Surabaya tetapi sudah masuk di kota-kota lain bahkan ada yang ke luar negeri tapi dalam bentuk mentah. Hal tersebut diperkuat

dengan penjelasan dari Ibu Umi selaku pengusaha kerupuk rengginang Moro Seneng:

“Setelah adanya pameran serta pelatihan dalam pengemasan dan pemasaran usaha kerupuk rengginang saya meningkat terutama dalam pengemasan banyak konsumen memberikan tanggapan yang positif karena dianggap lebih baik dan tahan lama. Demikaian berdampak pada banyaknya pesanan yang saya peroleh dari berbagai daerah mulai dari Surabaya, kemudian pesanan dari oleh-oleh Bakpao Telo yang ada di Pasuruan bahkan ada yang dibawah keluar negeri yang pada waktu itu dibawah mentahannya dan masih banyak daerah-daerah lain, hal tersebut juga salah satunya berkat adanya bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto”. (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Pentingnya promosi dan pemasaran sehingga nanti apabila memiliki pasar yang luas akan mampu mempermudah pemasaran hasil produksi, pemasaran yang selama ini hanya pada area lokal setelah dengan adanya pemberdayaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto wilayah pemasaran dapat diperluas hingga wilayah regional maupun nasional. Hal demikian di ungkapkan oleh Pengusaha krupuk rengginang Bapak Irfan selaku pengusaha asal Desa Sawahan:

“Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam kaitan dengan promosi yakni dengan menjadikan Desa Sawahan menjadi sentra usaha kerupuk rengginang sudah mulai ada dampaknya yakni dengan banyaknya konsumen dari luar daerah yang datang langsung ke pabrik di Desa Sawahan Kabupaten Mojokerto”. (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemasaran hasil pengusaha kerupuk rengginang Desa Sawahan semakin meningkat hal itu juga tidak terlepas dari upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mengembangkan potensi usaha rengginang sebagai produk unggulan dengan mengenalkan Desa Sawahan sebagai sentra usaha krupuk rengginang. untuk membuat konsumen semakin percaya maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mendorong pengusaha untuk mempertahankan kualitas produknya sehingga konsumen benar-benar memilih produk ini, selain itu dengan kualitas produk yang bagus maka diharapkan pemasaran produk ini bisa lebih luas di pasar regional dan nasional bahkan internasional.

Sejatinya dalam sebuah usaha khususnya industri kecil membutuhkan usaha yang keras agar keberlangsungan usahanya dapat terus ada, yakni salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tapi yang paling penting ialah dengan melakukan promosi, upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mampu meningkatkan promosi dan pemasaran hal itu bisa kita lihat melalui tabel mengenai pemasaran produk kerupuk rengginang baik di pasar lokal maupun regional.



**Tabel 8 : Data Tingkat Pemasaran dan Jumlah Bahan Bakar yang di butuhkan pada Tahun 2012**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KONTAK PERSON	BAHAN BAKAR / HARI			% PEMASARAN	
			JENIS	VOLUME	SATUAN	LOKAL	REGIONAL
1	ILLA MAKMUR	IRFAN EFENDI	LPG	2	Tabung	20	80
2	MEKAR JAYA	HARIYANTO	LPG	3	Tabung	10	90
3	BAROKAH	IMAM SYA'RONI	LPG	2	Tabung	80	20
4	PARI KETAN	YUSTINA	LPG	3	Tabung	10	90
5	MORO SENENG	UMI MUFIDAH	LPG	2	Tabung	10	90
6	MEGA JAYA	ASERI	LPG	3	Tabung	30	70
7	SUMBER REJEKI	SRIATI	LPG	5	Tabung	10	90
8	VIAN JAYA	SATURI	LPG	2	Tabung	60	40
9	GAYA BARU	HADI JALALUDIN	LPG	4	Tabung	70	30
10	KARUNIA	KUSAERI	LPG	1	Tabung	100	0

*Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sudah di Olah (2014)*

### c. Tenaga Kerja yang Terserap

Adannya industri kecil kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto memberikan pengaruh cukup berarti bagi kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yaitu terbukanya lapangan kerja baru dalam sektor industri kecil usaha kerupuk rengginang sehingga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk bekerja di sektor tersebut. Sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan sudah tidak mampu lagi menyerap banyak tenaga kerja, disamping itu jika ingin mendirikan suatu usaha, modal yang diperlukan juga tidak sedikit sementara jumlah buruh dan pengangguran semakin banyak sehingga banyak penduduk yang mulai mencari alternatif pekerjaan lain. Salah satu sektor yang dianggap bisa menyerap tenaga kerja dan padat karya adalah usaha kerupuk rengginang. Keberadaan industri kecil kerupuk rengginang ini dianggap masyarakat setempat telah mampu sedikit memberikan lapangan kerja baru. Kesempatan kerja dalam industri kerupuk rengginang ini dapat berupa menjadi tenaga kerja dapat juga ikut mengembangkan menjadi pengusaha baru juga.

Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selaku Fasilitator juga tidak tinggal diam, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan pejabat setempat dan para pengusaha untuk memberikan motivasi dan arahan kepada ibu-ibu yang belum memiliki pekerjaan agar bisa produktif dan kreatif. Tidak dapat dipungkiri

keberadaan usaha kereupuk rengginang ini mampu memberikan kesempatan kerja baik sebagai pekerjaan pokok maupun sebagai pekerjaan sampingan. Dengan adanya usaha rengginang ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Sawahan tersebut. Keberadaaan industri kerupuk rengginang ini sejak dulu sampai sekarang mempunyai pengaruh yang tidak kecil bagi masyarakat Desa Sawahan. Dikatakan oleh Ibu Umi selaku pengusaha kerupuk rengginang moro seneng:

“Bawasannya dulu kebanyakan ibu-ibu menjadi buruh tani tetapi seiring dengan perkembangan industri mereka banyak yang menganggur, kondisi tersebut dikarenakan banyak lahan dan sawah yang sudah dijual di jadikan pabrik dan pemukiman dengan adanya industri kerupuk rengginang para ibu-ibu bisa bekerja mulai dari produksi hingga pengemasan yang hasilnya bisa membantu perekonomian keluarga”. (wawancara hari sabtu 5 juli 2014)

Seiring dengan semakin sempitnya lahan pertanian dan semakin banyaknya angkatan kerja dengan keberadaanya usaha krupuk rengginang dapat membantu Desa Sawahan dalam menyerap tenaga kerja khususnya para ibu-ibu dan anak usia muda terangkat. Seperti yang kita ketahui dalam proses produksi krupuk rengginang kebanyakan di kerjakan oleh ibu-ibu dan anak-anak muda. Hal demikian dibuktikan melalui gambar dibawah.



**Gambar 6: Karyawan Melakukan Proses Pengemasan**



*Sumber: Dokumentasi Penulis (2014)*

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ikut mendorong dan memotivasi para ibu-ibu Desa Sawahan untuk bisa lebih produktif karena melalui usaha kerupuk rengginang ini memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja baru di sektor tersebut. Semua itu dapat dibuktikan lewat tabel berikut.

**Tabel 9: Jumlah Tenaga Kerja dan Jenis Produksi Pada  
Tahun 2012**

NO .	NAMA PERUSAHAAN	KONTAK PERSON	ALAMAT		TENAGA KERJA (ORANG)		
			JALAN / DESA	KECAMATAN	PR	LK	JML
1	ILLA MAKMUR	IRFAN EFENDI	SAWAHAN	MOJOSARI	6	1	7
2	MEKAR JAYA	HARIYANTO	SAWAHAN	MOJOSARI	15	1	16
3	BAROKAH	IMAM SYARONI	SAWAHAN	MOJOSARI	10	2	12
4	PARI KETAN	YUSTINA	SAWAHAN	MOJOSARI	9	1	10
5	MORO SENENG	UMI MUFIDAH	SAWAHAN	MOJOSARI	13	3	16
6	MEGA JAYA	ASERI	SAWAHAN	MOJOSARI	11	1	12
7	SUMBER REJEKI	SRIATI	SAWAHAN	MOJOSARI	12	1	13
8	VIAN JAYA	SATURI	SAWAHAN	MOJOSARI	7	1	8
9	GAYA BARU	HADI JALALUDIN	SAWAHAN	MOJOSARI	13	2	15
10	KARUNIA	KUSAERI	SAWAHAN	MOJOSARI	4	1	2

*Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sudah di Olah (2014)*

### **3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan usaha kecil menengah kerupuk rengginang**

#### **1) Faktor Pendukung**

UKM kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto merupakan UKM yang sangat potensial melalui produk usahanya diharapkan mampu menembus pasar global baik skala nasional maupun internasional disamping itu mampu menjadikan sebagai produk makanan unggulan daerah Mojokerto karena yang seperti kita ketahui kerupuk rengginang merupakan makanan olahan tradisional yang perlu kita lestarikan dan kita tingkatkan kualitasnya. Untuk dapat mencapai tahap seperti demikian maka perlu adanya faktor pendukung dari usaha tersebut. Faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan usaha kerupuk rengginang agar mampu menjadikan usaha kerupuk rengginang mampu bersaing adalah sebagai berikut

##### **a. Pelestarian makanan tradisional**

Kerupuk rengginang asli Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto merupakan olahan tradisional dari beras ketan yang sudah terkenal, namun ketenarannya tersebut kini sedikit demi sedikit sudah mulai terancam seiring dengan banyaknya makanan-makanan yang beredar di pasaran yang jauh lebih enak dan menarik. Agar keberadaanya tetap terlestarikan maka perlu adanya usaha-usaha pelestarian dengan cara melakukan pemberdayaan bagi para pengusaha. Pemerintah



dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku fasilitator masyarakat memiliki tekad yang besar untuk melakukan pelestarian hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Ani Selaku Kepala Seksi Bidang Industri, Makanan, Minuman, dan Tembakau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

“Industri kecil kerupuk rengginang merupakan makanan tradisional dari Mojokerto yang keberadaannya sudah mulai terancam oleh produk-produk luar, banyak produk-produk makanan mulai menyerang pasar dalam negeri maka dari itu kita tertantang untuk melakukan upaya pelestarian melalui program-program yang sifatnya pemberdayaan. Kita mendorong agar para pengusaha terus melakukan peningkatan-peningkatan tidak hanya puas dengan kondisi yang telah ada” (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemberdayaan adalah karena industri yang berasal dari olahan beras ketan ini merupakan makanan tradisional yang keberadaannya perlu dilestarikan agar tidak menjadi kenangan masa lalu.

#### b. Tenaga Kerja Yang Cukup Melimpah

Kondisi masyarakat yang ada di Desa Sawahan dapat dikatakan kondisinya sangat mendukung untuk meningkatkan potensi usaha kerupuk rengginang, hal tersebut dapat terlihat dari cukup tersedianya tenaga kerja yang diperlukan disamping biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja yang cukup terjangkau. Dengan adanya kondisi demikian akan menjadikan suatu keuntungan tersendiri bagi industri kerupuk rengginang selain tidak perlu susah-susah mencari tenaga kerja dari luar desa, juga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa

Sawahan khususnya melanda ibu-ibu serta anak muda usia produktif. Melalui industri kerupuk rengginang ini setidaknya banyak membantu memberikan pekerjaan teruama ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak usia produktif. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Umi selaku pemilik usaha kerupuk rengginang di Desa

Sawahan, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya tenaga pembantu dalam pembuatan produksi kerupuk rengginang Alhamdulillah usaha saya masih tetap bisa berjalan saat ini. Dari usaha ini saya dapat mempekerjakan 14 orang dimana mereka kebanyakan ibu-ibu rumah tangga hanya sebagian kecil saja anak muda itupun sambil mencari pekerjaan lain mereka ikut membantu saya. Dengan keterlibatan para tetangga saya dalam pembuatan produksi kerupuk rengginang maka saya secara langsung juga ikut dalam mengurangi jumlah pengangguran” (wawancara hari Sabtu 5 Juli 2014)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melalui tenaga kerja yang melimpah menjadikan kemudahan dalam mengembangkan usaha kerupuk rengginang sehingga sampai saat ini usaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan masih bisa tetep produksi. Disamping itu dengan tertampungnya warga Desa Sawahan sebagai tenaga kerja maka dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut selain itu juga dapat menambah penghasilan warga sebagai usaha sampingan atau usaha pokok.

## 2) Faktor Penghambat

### a. Mahalnya Harga Bahan Baku

Industri kecil merupakan industri yang mana sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku di pasaran, jika bahan baku susah didapat maka yang didapat adalah harga yang sangat mahal untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Jika harga sebuah bahan baku tersebut mahal maka proses produksi akan terhambat dan harga dari produk olahan tersebut akan melonjak namun konsumen tidak akan mampu membeli. Dalam hal ini maka pengusaha hanya bisa berharap pada pemerintah untuk dapat menstabilkan harga atau menyediakan bahan baku yang terjangkau bagi para pengusaha.

### b. Tidak Adanya Kelompok Usaha atau Paguyuban

Inti dari pemberdayaan adalah menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Perlu nya dibentuk suatu kelembagaan bagi para pengusaha agar supaya dalam setiap kendala atau permasalahan dapat segera dipecahkan seperti kita ketahui industri kecil sangat rentan dengan permasalahan terutama tekanan dan persaingan pasar dari luar. Tidak itu saja dengan adanya kelembagaan sebenarnya juga dapat memudahkan pengaturan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses upaya pemberdayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ani Selaku Kepala Seksi Bidang Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan:



“Kendala tidak mau berkelompok masih sendiri-sendiri tidak mau berkelompok Karena masih ada kekuatiran takut kalau berkelompok nanti di monopoli mereka mungkin masih jiwannya individual, ingin dagangannya laku keras sendiri trus juga takut kalau resepnya ketahuan. Kalau tidak mau berkelompok akibatnya kalau ada hibah dan bantuan dari negara tidak tersalur dengan baik apalagi peraturan berkenaan dengan pemberian hibah sekarang sudah ketat” (wawancara hari Senin 30 Juni 2014)

### **C. Pembahasan**

#### **1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kerupuk Rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojoerto**

Keberadaan UKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting karena selain sebagai penopang pembangunan juga sebagai penyerap tenaga kerja. Dalam kaitan dengan penulisan ini UKM Kerupuk rengginang merupakan salah satu ponopang kehidupan masyarakat Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Keberadaan UKM kerupuk rengginang rentan terhadap perubahan-perubahan yang sifatnya dari luar seperti adanya persaingan global hingga kelangkaan-kelangkaan bahan baku, sehingga disini perlu adanya suatu dorongan dari pemerintah terhadap suatu usaha kecil agar usahanya tetap bisa berjalan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arsyad: (1999:120) dalam upaya pemberdayaan ada 4 peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah yaitu :

- a. Sebagai entrepreneur, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis.
- b. Sebagai coordinator, bahwa pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan. Pemerintah daerah juga bisa

melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi.

- c. Sebagai fasilitator, bahwa pemerintahan daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya.
- d. Sebagai *stimulator*, bahwa pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.

Sesuai dengan konsep diatas, Dinas perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Mojokerto dalam upaya pemberdayaan usaha kecil kerupuk rengginang di Desa Sawahan telah melaksanakan beberapa hal sebagaimana yang tertuang dalam konsep diatas, antara lain: memfokuskan pada sisi entrepreneur. pada sisi ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menempatkan produk kerupuk rengginang sebagai salah satu produk unggulan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan makanan tradisional agar keberlangsungannya tidak termakan oleh jaman.

Selain sebagai entrepreneur pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berperan sebagai koordinator yakni pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berkenaan dengan koordinasi adalah membentuk bidang yang berfungsi mengkoordinasi usaha kerupuk rengginang melalui pengelompokan jenis usaha yang berfokus pada Industri Kimia dan Agro. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih mudah untuk membina serta mengembangkan usaha kecil sesuai dengan bidang yang ada, selain itu dengan koordinasi yang

tersusun secara sistematis sesuai dengan bidang masing-masing, tentunya dinas juga akan lebih mudah dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing bidang yang dikembangkan.

Pengembangan usaha kecil kerupuk rengginang Desa Sawahan tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. untuk itu perlu adanya proses pendampingan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tujuannya untuk melihat langsung dilapangan terkait proses pengembangan dan produksi usaha kerupuk rengginang. Berkenan degan upaya pemerintah selaku fasilitator adalah melakukan pendampingan secara langsung dilapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan sejumlah pembinaan terkait dorongan pengusaha kerupuk rengginang dalam mengembangkan kualitas produknya. Selain memberikan penyuluhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan pelatihan tentang peningkatan managerial pemasaran agar produksi usaha yang dipasarkan mampu bersaing baik di tingkat lokal, regional maupun mancanegara

Upaya yang lain berkenaan dengan *stimulator* yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah memberikan batuan berupa sarana-prasaran dalam proses penunjang produksi. Pemberian bantuan ini dimaksudkan sebagai upaya dari dinas untuk memberikan stimulus kepada para pengusaha agar mereka bersemangat lagi dan usaha yang mereka jalankan dapat berkembang.

Jadi upaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang telah dilakukan dengan cara entrepreneur ialah menjadikan kerupuk rengginang



sebagai produk unggulan daerah, koordinator melalui Bidang Bina Industri Kimia dan Agro, Fasilitator melalui pelatihan dan pendampingan, Stimulator melalui bantuan peralatan sarana-prasarana, telah mampu mewujudkan usaha kerupuk rengginang yang mandiri dan tangguh sebagai identitas daerah dan produk unggulan daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto.

**a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Upaya pemberdayaan tidak hanya dilihat pada bidang perekonomian saja, tetapi juga diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dalam suatu usaha, merekalah yang menentukan maju mundurnya suatu usaha, dengan memiliki tenaga kerja yang kreatif, terampil serta memiliki sifat kerja keras yang tinggi, maka dapat dipastikan dalam proses produksi dapat berjalan dengan baik namun dalam penerapannya untuk mencari sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan mau bekerja keras sangat sulit permasalahan ini merupakan masalah selalu dihadapi oleh usaha kecil di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam hal kreatifitas dan terampil, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk sehingga dari waktu ke waktu tidak akan mengalami perubahan kualitasnya, dengan memiliki kedua aspek tersebut akan mampu meningkatkan produktivitas dan dapat menembus pasar global. Melihat begitu pentingnya kegunaan sumber daya manusia

dalam sebuah industri kecil maka pemerintah dalam hal ini perlu mengembangkan sumber daya manusia pengusaha kecil melalui program pemberdayaan.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Eko (2002) dalam dua pandangan pemberdayaan yakni pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik kepada masyarakat tentu merupakan tugas negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan memiliki makna terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri.

Melalui dua pandangan pemberdayaan tersebut, tujuannya adalah membuat masyarakat yang mandiri oleh karena itu dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni serta memiliki inovasi yang tinggi. Sehingga segala macam program yang diberikan oleh pemerintah dapat terserap oleh masyarakat dan dapat segera di implementasikan melalui pendirian suatu usaha yang mampu membuat keluarga dan lingkungannya berdaya. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah mengupayakan pemberdayaan dalam mengembangkan sumber daya manusia kepada pengusaha kecil khususnya pengusaha kereupuk rengginang Desa Sawahan

Kecamatan Mojosari melalui bimbingan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk pengusaha kecil secara *sustainable*. Kebanyakan pengusaha kerupuk rengginang yang ada di Desa Sawahan hanya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Secara teknis pengusaha kerupuk rengginang mampu membuat produk rengginang dengan baik tetapi dalam pengemasannya belum begitu baik, disamping itu untuk teknik manajerial yang digunakan juga belum dikelola dengan baik.

Sementara itu untuk pendidikan dan pelatihan secara umum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berfokus pada dua hal inti yaitu pelatihan dan penyuluhan. Tujuan dari pelatihan adalah melatih para pelaku usaha kecil agar dapat lebih kreatif dan inovatif hasil produksinya yang nantinya mendapatkan produk yang berkualitas dan laku di pasaran. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan adalah tentang peningkatan manajerial pemasaran, mereka dibina bagaimana caranya mencari segmen pasar yang potensial kemudian juga diajarkan bagaimana cara meningkatkan kualitas kemasan produk di antaranya mereka kita latih untuk membuat kemasan yang baik, baik dari sisi estetis enak dilihat dari sisi regulasi standarnya pencantuman di label kemudian standart higenitas bahan-bahan yang baik untuk kemasan tujuan dari diadakannya pelatihan ini untuk meningkatkan daya saing. Sedangkan untuk penyuluhan mereka di bimbingan terkait teknik dengan peningkatan kualitas produk seperti terus mendorong mereka untuk melakukan pengurusan izin industri.



### **b. Bantuan Alat Penunjang Produksi**

Dalam upaya pemberdayaan industri kecil tidak hanya berpaku pada pengembangan sumber daya manusia dan pemberian bantuan dana, namun pemberian alat penunjang produksi juga sangat diperlukan. Pemberian alat penunjang proses produksi penting bagi para pelaku industri kecil karena yang seperti kita ketahui masih banyak industri kecil yang masih memakai alat-alat tradisional dengan diberikannya alat penunjang produksi maka diharapkan dalam proses produksi akan menjadi lebih banyak. Seperti yang dikemukakan oleh Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40), dalam upaya pemberdayaan terhadap industri kecil pemerintah salah satunya harus melakukan pembangunan perasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam kaitan hal diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya pemberdayaan terhadap para pengusaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan telah melakukan pembangunan prasarana sebagai pendukung melalui teknologi tepat guna (TTG) pemerintah telah pemberian alat untuk proses penunjang produksi yaitu pemberian alat pengemasan teknologi tersebut dapat membantu para pengusaha agar lebih bagus dan praktis dalam pengemasan dengan hasil dari teknologi tersebut produk-produk mereka mulai bersaing di pasaran regional maupun nasional.

### c. Kemudahan Dalam Pengurusan Perizinan

Upaya pemerintah dalam pemberdayaan sangat dibutuhkan oleh banyak pelaku usaha, terutama pada usaha kecil menengah, upaya pemerintah tersebut berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha terutama pada industri kecil menengah untuk mengembangkan bisnis usahanya. Upaya pemerintah ini antara lain diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, serta bantuan sarana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah mempermudah pemberian izin usaha, karena dengan sudah memiliki izin usaha artinya secara legal formal usaha yang telah dimiliki oleh para pengusaha tersebut memiliki kekuatan hukum, tujuan dari pada itu adalah membantu para pengusaha atau wirausaha dalam meningkatkan omset penjualan karena dengan adanya pengurusan izin maka produk mereka diakui kualitasnya oleh para konsumen yang pada akhirnya banyak konsumen yang mau membeli.

Di Kabupaten Mojokerto sendiri khususnya pada dinas perindustrian dan perdagangan guna membantu para pengusaha kerupuk rengginang, dinas sudah menyiapkan serta menerapkan langkah strategis untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha kerupuk rengginang untuk mendirikan usahanya agar memiliki kekuatan hukum, selain itu diharapkan dengan kemudahan tersebut akan mampu menarik minat masyarakat yang lainnya untuk semakin menambah jumlah usaha kerupuk rengginang. Kemudahan pemberian usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk menyederhanakan tata cara mekanisme pengurusan surat-surat serta persyaratan

administratif yang terlalu ribet, dengan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan mendirikan usaha kerupuk rengginang. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Mojokerto sebagai sentra usaha kereupuk rengginang.

Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan untuk usaha kecil ini, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam konsep Usaha kecil oleh Tohar (2002:31) dikatakannya bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil harus melalui aspek perundang-undangan serta aspek kebijakan. Salah satu aspek utama adalah perizinan usaha, yang dimaksud disini adalah penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek perizinan usaha, hal ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan antara lain, untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan sistem pelayanan satu atap. Serta memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto tersebut juga sesuai dengan konsep pada paparan diatas bahwa ada suatu kebijakan khusus yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk para pengusaha agar meningkatkan iklim usaha, serta memacu agar bertambahnya wirausaha yang bergerak di bidang kuliner, dan mengurangi jumlah para pengangguran.



#### **d. Promosi dan Pemasaran**

Selama ini kendala paling utama yang dihadapi oleh semua usaha khususnya yang bergerak di bidang usaha kecil menengah adalah bagaimana cara memasarkan barang yang sudah mereka produksi kebanyakan mereka tidak memiliki kemampuan terhadap pencarian pasar. Permasalahan demikian berkaitan dengan akses memperoleh pasar mulai dari pasar, regional, nasional bahkan internasional. Jadi secara umum memang akses pasar selalu menjadi kelemahan bagi usaha kecil menengah, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jafar (2004:41) dalam faktor eksternal penghambat Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengembangkan usaha terutama terbatasnya akses pasar. Jafar mengatakan akses pasar yang terbatas akan berakibat pada produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

Berarti dampak negatif dari terbatasnya akses pasar secara langsung akan mengakibatkan produksi yang dihasilkan kurang berkembang, hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah seperti yang dikatakan Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40) dalam upaya pemberdayaan pemerintah harus menyediakan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Merupakan lembaga yang menangani hal tersebut melakukan langkah antisipasi ini secara efektif telah dijalankan oleh dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait untuk melakukan pameran-pameran dengan

maksud untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk dari para pengusaha.

Upaya yang dilakukan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk pengembangan UKM adalah yang pertama melalui pelatihan berkenaan dengan managerial pemasaran dalam pelatihan tersebut pengusaha diberikan pengetahuan bagaimana cara menjaring pasar yang potensial kemudian kemudian yang kedua dengan menghadiri pameran-pameran sehingga dengan adanya promosi melalui kegiatan pameran mampu membuka akses terhadap pasar yang lebih luas yang nantinya produk rengginang dapat dikenal dikalangan luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan industri kecil khususnya pengusaha rengginang perlu dibutuhkan kerjasama dengan pihak terkait berkenaan dalam pembukaan akses pasar yang lebih luas karena selama ini menurunnya penjualan dikarenakan dalam proses pemasarannya masih dari mulut ke mulut.

## **2. Keberdayaan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Meliputi:**

Upaya pemberdayaan perlu dilakukan oleh semua tingkatan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena sesungguhnya pemberdayaan adalah bagian dari tugas pemerintah selaku penanggungjawab keberlangsungan negara. Untuk mengatur serta mengarahkan kehidupan masyarakatnya kearah yang

lebih baik khususnya dalam dunia usaha pemerintah perlu penciptaan iklim yang kondusif untuk agar mampu menumbuhkan peningkatan finansial serta ekonomi dari para pelaku usaha, utamanya pada industri kecil dan menengah. UKM yang dalam hal ini adalah difokuskan untuk menggerakkan perekonomian daerah guna mengangkat tingkat kemakmuran daerah melalui peningkatan APBD, dengan adanya otonomi daerah maka peran dari pemerintahan daerah menjadi sangat vital dan strategis, untuk mendorong dunia usaha melalui UKM dapat berkembang dengan baik.

Kabupaten Mojokerto yang dalam hal ini memiliki tugas mengembangkan usaha kerupuk rengginang, yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, selain untuk kebutuhan individu dalam arti peningkatan kemampuan finansial untuk kesejahteraan individu, selain itu juga untuk keperluan kebutuhan daerah, artinya usaha kerupuk rengginang ini diupayakan agar mampu meningkatkan investasi daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, serta menumbuhkan iklim usaha di daerah dengan tujuan akhir agar adanya identitas pemasaran untuk daerah terutama Kabupaten Mojokerto.

Pemberdayaan UKM yang dalam hal ini di Kabupaten Mojokerto adalah para pengusaha kerupuk rengginang dilakukan pemberdayaan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Melalui bidang Bina Industri Kimia dan Agro banyak hal yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan untuk para pengusaha kerupuk rengginang. Pengurusan dalam perizinan Pembinaan ketrampilan



SDM, mengarahkan dalam pemilihan pangsa pasar, dan dengan memberikan bantuan alat produksi guna meningkatkan produksi pada sentra industri kecil kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini diharapkan dapat membuat industri kerupuk rengginang mampu berkembang, bertahan dari resistensi iklim perekonomian serta akan menciptakan produk unggulan daerah. Fokus utama dari pemberdayaan ini adalah pembinaan dan pelatihan untuk para pengusaha.

Pembinaan serta pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan, daya jelajah untuk pemasaran serta dorongan agar ada mental yang kuat dari para pengusaha untuk menjadi usahawan yang gigih dan tangguh. Artinya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah disini mendapat antusiasme yang cukup baik dari masyarakat terutama di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari, karena memang pada intinya suatu pemberdayaan faktor keberhasilan harus didukung dari sinergi yang positif antara masyarakat serta pemerintah, masyarakat adalah objek dari pemberdayaan yang dilakukan, serta pemerintah adalah subjek atau pelaku dari pemberdayaan tersebut sebagai inisiatif pengembangan, pembinaan serta pemberi bimbingan untuk dunia usaha terutama yang mendukung kemanfaatan untuk daerah agar hasil serta karya yang dihasilkan mampu menguntungkan semua pihak, baik itu pemerintah sendiri, daerah maupun masyarakat secara khusus.

Prijono dan Pranarka (1996:2) mengatakan bahwa proses pemberdayaan untuk masyarakat kecil dan UKM dibagi menjadi beberapa tahap salah satunya fase

atau tahap partisipatoris, fase ini diartikan sebagai proses pemberdayaan itu berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Artinya bahwa pemberdayaan itu berasal dari pemerintah kemudian dijalankan bersama oleh masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil secara bersama-sama (keuntungan bersama) masyarakat serta pemerintah.

Pada teori ini tampak bahwa pemberdayaan itu membutuhkan sinergi antara pemerintah sebagai *key factor*, *key inisiator* serta masyarakat sebagai objek untuk sama-sama memiliki peran masing-masing untuk mendorong keberhasilan pemberdayaan. Dan menurut hemat penulis pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk para pengusaha kerupuk rengginang yang berfokus di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari telah menunjukkan adanya kerjasama yang positif serta penerimaan yang positif dari masyarakat sebagai pelaku usaha.

Bahwa proses pemberdayaan melalui tahap partisipatoris yang membutuhkan inisiatif serta tanggapan yang positif dari masyarakat dan pemerintah telah dilakukan dan dijalankan dengan baik di Kabupaten Mojokerto. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar secara maksimal menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat pengusaha kerupuk rengginang, pemasaran hasil usaha, serta penciptaan lapangan pekerjaan maupun mereduksi jumlah pengangguran dengan Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pengusaha kerupuk rengginang.

**a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengusaha dan Karyawan  
Kerupuk Rengginang**

Pemberdayaan dari pemerintah tidak hanya difokuskan untuk membina, melatih serta membimbing saja tetapi juga diharapkan mampu mendorong para pengusaha kerupuk rengginang di Kabupaten Mojokerto terutama di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari untuk memperoleh manfaat dari sisi ekonomi. Adanya pameran produk yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, kemudian pembinaan melalui cara bagaimana melakukan pengemasan dengan baik serta bagaimana memasarkan produk agar mendapat jaringan pasar yang lebih luas, telah secara maksimal dimanfaatkan oleh para pengusaha kerupuk rengginang di Kabupaten Mojokerto. Kenyataannya banyak ekonomi dari warga sekitar terangkat.

Semakin besarnya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tidak lain adalah sebagai wujud agar usaha kerupuk rengginang yang terdapat di Kabupaten Mojokerto tersebut dapat berkembang dengan baik, berkembang untuk menumbuhkan iklim kemandirian berwirausaha, berkembang untuk menumbuhkan iklim kerja guna memperluas lapangan pekerjaan, serta berkembang sebagai identitas lokal. Terutama sebagai identitas lokal ini penting, karena dengan hal ini pemasaran hasil usaha tidak akan susah-susah untuk dipasarkan ke daerah lain. Artinya selain menguntungkan bagi para pengusaha juga akan secara positif sebagai brand untuk wilayah Kabupaten Mojokerto karena otomatis para



konsumen akan mengetahui bahwa sentra usaha kerupuk rengginang ada di Kabupaten Mojokerto.

Terbentuknya sentra usaha kerupuk rengginang di Kabupaten Mojokerto ini berarti terdapat potensi lokal yang tergali ditengah-tengah masyarakat. Potensi tersebut tentunya harus mendapat dorongan dari pemerintah untuk bagaimana kemudian memaksimalkan dengan pembinaan serta bimbingan-bimbingan agar perkembangannya semakin pesat. Potensi lokal yang ada tersebut tidak akan pernah tergali dengan baik tanpa pemerintah daerah setempat. Menurut Elliot dalam (Riyadi dan Supriady, 2004:80) menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan atau empowerment salah satunya adalah strategi dengan pendekatan *The Welfare State*, inti dari strategi ini menyebutkan bahwa Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdayakan masyarakat dalam menghadapi proses politik, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

Jadi jelas bahwasanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah harus mampu “mengeluarkan” potensi masyarakat dan di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto lewat bidang Bina Industri Kima dan Agro, telah mampu memberdayakan para pengusaha kerupuk rengginang dengan serangkaian pembinaan, pelatihan serta bimbingan kepada para pengusaha. Perubahan signifikan selain mulai tumbuhnya usaha ini dengan baik. Selain itu dari sudut pendapatan juga

ada kenaikan secara signifikan. Menurut data dari Disperindag menunjukkan bahwa rata-rata omset pendapatan mereka cukup tinggi dari ratusan ribu sampai puluhan juta.

Tentunya perputaran ekonomi di Desa Sawahan ini akan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut secara umum. Adanya peningkatan pendapatan dari para pengusaha membuat produksi semakin meningkat dan berkualitas, hal ini membuat permintaan akan produk kerupuk rengginang menjadi bertambah. Otomatis dengan hal tersebut ada keuntungan secara finansial yang akan didapat oleh para pengrajin, peningkatan secara finansial ini berpengaruh kepada kesejahteraan mereka baik secara primer maupun sekunder, kebutuhan-kebutuhan pokok dengan kesejahteraan yang baik sangat mungkin terpenuhi. Begitu pula dengan kebutuhan sekunder

#### **b. Pemasaran Hasil Usaha**

Upaya perhatian pemerintah wajib terus dilakukan secara menyeluruh dan kontinyu kepada usaha kecil dan menengah, secara umum di negara Indonesia fakta memperlihatkan matinya UKM terutama disebabkan kurangnya penguasaan dalam proses pemasaran. Ini adalah sebuah problem klasik yang secara terus-menerus, secara turun-temurun akan selalu dihadapi para pengusaha yang bergerak pada tataran UKM. Padahal secara konkrit UKM adalah salah satu penggerak roda kehidupan ekonomi terutama kepada kalangan menengah-kebawah, lewat UKM pula nasib

jutaan masyarakat tergantung. UKM selama ini telah memberikan harapan kepada banyak masyarakat, namun sekali lagi UKM memiliki kelemahan terhadap resistensi ekonomi terutama pada sisi pemasaran.

Oleh karena itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah, lewat pemberdayaan kepada mereka para pengusaha di bidang UKM. Begitu juga ketika kemudian kita melihat realita pada pengusaha atau pengusaha di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Butuh ada keterlibatan, bantuan, uluran tangan pemerintah tidak hanya pelatihan saja namun secara nyata di Desa ini para pengusaha lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mampu membina serta membimbing mereka kearah yang lebih baik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah memberdayakan para pengusaha kerupuk rengginang, pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait pemasaran hasil usaha telah banyak diupayakan melalui kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah lain untuk menyelenggarakan pameran peroduk unggulan yang diikuti oleh pengusaha salah satunya pengusaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan, disamping itu juga diadakan pembinaan dan pelatihan managerial pemasaran sebagai sarana untuk memasarkan produk mereka.

Ini merupakan suatu langkah yang tepat, karena apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah sangat membantu para pengusaha kerupuk rengginang. Kita perlu mengingat bahwa kendala utama selain pada pemasaran hasil usaha yang selama ini dihadapi oleh UKM dan pengusaha



kerupuk rengginang termasuk di dalamnya. Langkah jitu ini telah membawa dampak untuk pemasaran hasil produk yang dihasilkan oleh para pengusaha di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari mampu menembus pasar internasional melalui ekspor produk. Pencapaian ini tentulah sangat mengembirakan. Karena selain mampu menembus ketatnya persaingan di pasar lokal, kerupuk rengginang ini juga mampu menembus pasar ekspor tentu secara mutu serta kualitas sudah tidak perlu diragukan.

Pemasaran hasil usaha yang dilakukan lewat pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto secara signifikan sangat membantu para pengusaha, dalam tataran ini dinas melalui delegasinya dari Bidang Bina Industri Kimia dan Agro memberikan pengetahuan serta pemahaman bagaimana mengembangkan usaha dimulai dari pelatihan managerial pemasaran dan pengemasan sehingga jaringan pemasaran terbuka secara lebar.

Selain ada pelatihan untuk meningkatkan managerial pemasaran, Dinas juga mengupayakan cara lain dengan membuka kerja sama dengan daerah lain guna mengadakan pameran produk unggulan. Tentunya sangat bermanfaat program ini untuk pengusaha kerupuk rengginang Desa Sawahan supaya diketahui oleh daerah lain. Jadi para pengusaha tidak perlu bersusah-susah untuk mempromosikan hasil kerajinan mereka.

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini berarti bagaimana kemudian mereka berusaha memberdayakan

masyarakat pengusaha untuk bisa memanfaatkan peluang, mengembangkan kreatifitas, serta mengembangkan produksi usaha. Dalam teori strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Tambunan (2000:81) pada point ketiga bahwa pemberdayaan usaha industri kecil adalah melalui Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan entrepreneurship dan kemampuan penguasaan teknologi.

Maksud dari pada konsep ini mengaris bawahi bahwa strategi pemberdayaan salah satu target utamanya adalah penguatan sumber daya manusia, peningkatan jiwa wirausaha serta kemampuan penguasaan teknologi. Melihat fakta apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan melakukan pembinaan, pengarahan melalui pelatihan pembuatan kemasan yang baik di situ salah satunya dengan pembuatan desain yang baik untuk kemasan serta pameran produk adalah integrasi untuk mengembangkan penguasaan teknologi, penguatan kreativitas untuk penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan jiwa wirausaha. Kita semua tentunya menyadari bahwa masyarakat desa baik itu di Desa Sawahan maupun di desa-desa yang lain tentu sangat terbantu dengan berbagai pelatihan, pembimbingan serta pembinaan ini terutama pelatihan pembuatan kemasan yang menarik, Usaha-usaha ini secara signifikan akan membantu terutama untuk pemasaran produk bagi mereka masyarakat di Desa Sawahan karena berbagai hal tersebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memang diarahkan kesana,

membuka peluang pemasaran yang lebih luas dengan jangkauan target pasar internasional

### **c. Tenaga Kerja yang Terserap**

Faktor salah satu penyebab kemiskinan adalah banyaknya pengangguran, pengangguran disebabkan oleh ketimpangan antara kesempatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan. Fenomena ini lazim sekali di negara kita, masih tingginya tingkat pengangguran baik itu dari tenaga kerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik memiliki kecenderungan hampir sama. Karena memang keseimbangan tidak tercipta terutama pada jumlah lapangan pekerjaan.

Orientasi klasik dari banyak masyarakat Indonesia adalah menjadi pegawai negeri artinya mereka sebagai “penunggu lapangan pekerjaan”, dengan asumsi ini tentu akan tercipta suatu titik persaingan yang sangat ketat terhadap hal ini, bisa dibayangkan dengan jumlah orang diusia kerja di Indonesia yang sangat banyak, hanya fokus untuk menjadi pegawai negeri, tentunya akan menyebabkan banyak angkatan kerja tidak akan tertampung semuanya berimbas pada pengangguran.

Disini berarti diperlukan suatu strategi khusus bahwasanya harus ada pemahaman, pengarahan, bimbingan, serta dorongan dari pemerintah untuk bagaimana kemudian angkatan kerja ini tidak hanya menjadi seorang PNS saja, melainkan harus mampu mandiri, menjadi seorang wirausaha. Diperlukan suatu keberanian dan tentunya dorongan dari pemerintah untuk menciptakan keberhasilan dibidang ini. Wirausaha



terutama pada UKM sangat berguna untuk mereduksi jumlah pengangguran di Negeri kita, karena mereka didorong untuk secara mandiri menghidupi kehidupannya dan usahanya.

Demikian juga apa yang kemudian kita lihat di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari, UKM melalui usaha kerupuk rengginang yang sejak berdirinya usaha ini telah mampu mereduksi pengangguran. Di Desa Sawahan usaha kerupuk rengginang ini adalah suatu alternatif untuk menampung angkatan kerja terutama lulusan SMP yang kebanyakan ada di desa ini. Selain itu usaha ini adalah suatu alternatif lapangan pekerjaan karena dari sektor lain seperti pertanian sudah tidak bisa secara masal menyerap tenaga kerja.

Keberadaan industri kerupuk rengginang di Desa Sawahan ini dianggap masyarakat setempat telah mampu memberikan lapangan kerja baru. Kesempatan kerja dalam industri kerupuk rengginang ini dapat berupa menjadi tenaga kerja dapat juga ikut mengembangkan menjadi pengusaha juga.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto juga secara aktif membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memaksimalkan bidang ini. Ada peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagai fasilitator melalui TPL (tenaga pelatihan lapangan) berkoordinasi dengan pengrajin untuk memberikan dorongan dan wawasan

kepada ibu-ibu dan anak-anak usia produktif yang belum memiliki pekerjaan agar bisa menjadi pengusaha yang tangguh dan inovatif.

Peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah salah satu upaya strategi memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk secara konsisten dapat menyerap tenaga kerja dengan mengembangkan jiwa entrepreneurship melalui usaha kerupuk rengginang. Asumsi teoritis ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tambunan (2000:81) terkait dengan strategi yang konsisten terhadap pemberdayaan usaha industri kecil atau usaha kecil menengah. Pada point ketiga dari strategi tersebut dikatakan bahwa, Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan entrepreneurship dan kemampuan penguasaan teknologi.

Artinya pemerintah utamanya disini adalah pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memberikan penguatan sumber daya manusia serta peningkatan entrepreneurship, seperti yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Sawahan para pengusaha kerupuk rengginang telah diberikan pembinaan, pelatihan serta bimbingan dalam rangka mengembangkan skill serta kreatifitas serta dorongan untuk menguatkan jiwa usaha mereka. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini secara kongkrit telah mampu mengembangkan usaha kerupuk rengginang ini sampai menembus pasar global, hal tersebut juga berkorelasi dengan adanya penambahan penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran dapat direduksi

terutama di Desa Sawahan pengurangan dapat terserap oleh usaha ini. Dengan fakta tersebut membuktikan bahwa secara nyata peran pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan pengusaha untuk meningkatkan hasil usaha serta kualitas usaha untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengurangan terutama di daerah telah secara efektif tercapai.

### **3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan usaha kecil menengah kerupuk rengginang**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Pelestarian Makanan Tradisional**

Rengginang merupakan makanan tradisional yang sudah mulai hilang akibat dari kalah bersaing dengan produk-produk makanan modern. Hal demikian membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan termotivasi untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap usaha kerupuk rengginang hal demikian sesuai apa yang dikatakan oleh Kartasasmita (1996:74) dalam konsep tahap-tahap pemberdayaan pada point ketiga disebutkan bahwasannya memberdayakan itu mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemikiran kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya



pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Pada point diatas kita mengambil makna secara tersirat bahwa pemberdayaan itu dilakukan untuk membuat masyarakat itu berdaya, melindungi, mengarahkan mereka agar ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan perekonomian bagi mereka. Dalam konteks usaha rengginang yang ada di Desa Sawahan, hal ini tentunya sangat berkorelasi dengan konsep diatas bahwa atas dasar pelestarian terhadap para pengusaha kecil kerupuk rengginang. Dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto agar potensi industri produk kerupuk rengginang ini diminati dan memiliki jangkauan pasar yang luas, maka dari itu keharusan bagi pemerintah daerah memberdayakan masyarakat pengusaha agar produk kerupuk rengginang tetap lestari

#### b. Tenaga Kerja Cukup Melimpah

Pelaksanaan dari pengembangan usaha kerupuk rengginang ini tentunya tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak disokong oleh potensi dari sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas memang masih perlu lagi adanya peningkatan karena memang banyak aspek yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap hal ini terutama kualitas pendidikan. Dalam hal ini dukungan ada pada kuantitas dari sumber daya manusia di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari. Tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak menjadikan suatu keuntungan tersendiri bagi pengusaha kerupuk rengginang selain

tidak perlu susah-susah mencari tenaga kerja dari luar desa, juga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Sawahan itu sendiri.

Tersedianya sumber daya manusia adalah potensi tersendiri di Desa Sawahan lewat upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto perbaikan kualitas juga tersentuh, banyak hal telah dilakukan mulai dari pembinaan, pelatihan, sampai kepada pengembangan kreatifitas untuk membangun iklim usaha yang mandiri dan berkualitas. Potensi ini memang harus dimanfaatkan baik itu oleh para pengusaha serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Dalam teori tahap-tahap pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996:74) bahwasannya pemberdayaan itu sendiri dilakukan melalui 3 arah, salah satu pointnya adalah pemerintah bersama-sama masyarakat harus mampu menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.

Fakta mengatakan bahwa masyarakat Desa Sawahan adalah di dominasi oleh angkatan kerja, peluang ini kemudian diserap oleh usaha kerupuk rengginang di desa tersebut. Pemerintah juga tidak tinggal diam banyaknya potensi terutama kuantitas sumber daya manusia mendorong pemerintah untuk membatu sentra usaha kerupuk rengginang mengembangkan produksinya lewat pelatihan serta pembinaan secara berkala dan motivasi untuk menambah antusiasme masyarakat untuk pengusaha ini.

Sehingga baik secara kualitas maupun kuantitas sudah terpenuhi untuk meningkatkan usaha kerupuk rengginang.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Mahalnya Harga Bahan Baku**

Keberlangsungan suatu usaha sangat bergantung kepada tingkat produktifitas serta kualitas produk usaha tersebut, apabila produktifitas dan kualitas bagus maka tentu keberlangsungan usaha akan semakin berkembang dengan baik, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka dapat dipastikan suatu usaha akan mengalami kegagalan, bila hal tersebut terjadi banyak hal yang akan dirugikan selain tentunya pemilik usaha, tenaga kerja juga akan menerima imbasnya.

Salah satu hal yang mempengaruhi produktifitas dan mutu suatu usaha adalah ketersediaan bahan baku, semakin mudah dan murah bahan baku yang didapat tentu akan berkorelasi positif dengan perkembangan usaha. Namun bila bahan bakunya sulit imbasnya terhadap usaha juga akan berpengaruh, seperti harga yang melambung tinggi dampaknya nanti pada larinya konsumen, pengurangan kualitas juga akan menyebabkan antusias dari konsumen menurun. Dampak paling buruk adalah kebangkrutan usaha.

Pada usaha kerupuk rengginang yang ada di Desa Sawahan, salah satu kendala yang dihadapi adalah mahalanya harga bahan baku yaitu beras ketan, karena fluktuasi harga juga mengikuti perkembangan atau imbas kenaikan maupun



penurunan kurs dolar, tentu hal ini sangat menyulitkan bagi para masyarakat pengusaha di Desa Sawahan. Hal ini memang sesuai dengan apa yang menjadi salah satu karakteristik usaha kecil menengah, bahwa karakteristik Usaha Kecil adalah skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

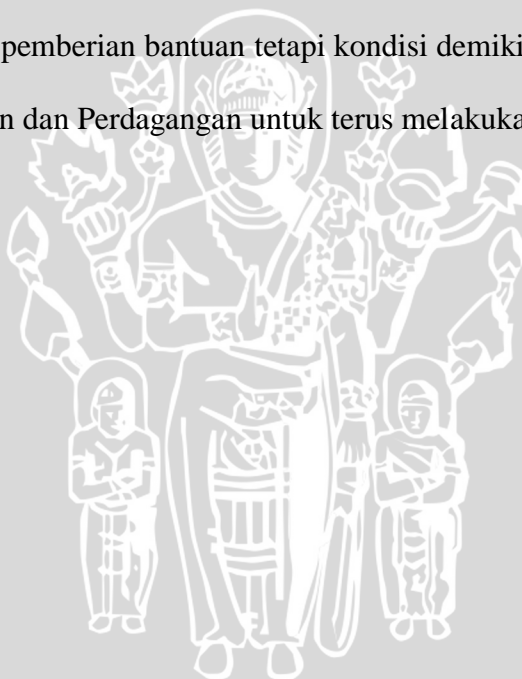
Apa yang ada pada pengusaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan juga demikian walaupun secara umum pemasaran telah berkembang namun tidak semua pengusaha memperolehnya, secara klasik memang jangkauan pemasaran, serta bahan baku adalah kendala utama yang harus dihadapi untuk mengembangkan usaha ini.

b. Tidak Adanya Kelompok Usaha atau Paguyuban

Salah satu penghambat dari proses pemberdayaan adalah ketidak adaan kelompok usaha atau paguyuban hal tersebut di dukung oleh Sjaifudin (1995: 66) disebutkan tentang adanya fungsi kelembagaan dalam kaitan dengan pemberdayaan, maksudnya Dalam hal ini instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mendorong inisiatif untuk mengembangkan usaha kecil serta terpadu dan berjangka panjang yang sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan maka dibuat suatu lembaga yang sifatnya pemberdayaan suatu kelompok usaha.

Dari uraian di atas jelas bahwa salah satu inti dari pemberdayaan adalah adanya upaya lembaga lain untuk bekerjasama melakukan proses pemberdayaan.

Kaitan dengan hal tersebut yang terjadi pada sentra usaha rengginang yang ada di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ialah ketidak adaanya lembaga atau paguyuban pengusaha rengginang sehingga yang terjadi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengalami kendala saat melakukan proses pemberdayaan. Kendala dalam proses pemberdayaan salah satunya adalah dalam proses penyaluran bantuan dari Pemerintah Pusat, karena peraturan pemerintah sekarang ketat yang mengupayakan adanya suatu lembaga usaha atau paguyuban dalam setiap pemberian bantuan tetapi kondisi demikian tidak menghalangi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk terus melakukan pemberdayaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan oleh penulis tentang upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) kerupuk rengginang, hasil kesimpulan ini berdasarkan apa yang telah dikaji dari penyajian data serta pembahasan terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas terhadap Pemberdayaan sentra usaha kerupuk rengginang di Desa Sawahan Kecamatan Mojosari, tingkat keberdayaannya dan faktor penghambat dan pendukung terkait upaya pemberdayaan sentra kerupuk rengginang . Dari hal tersebut maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Secara keseluruhan Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)” adalah:

##### a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)



Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara mengadakan workshop dan penyuluhan dengan melakukan bimbingan dalam pengemasan.

b. Bantuan alat Penunjang Produksi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah Memberikan beberapa alat seperti alat untuk penjemur rengginang, wajan, kompor dan yang paling utama alat untuk pengemasan kerupuk rengginang

c. Kemudahan dalam Pengurusan Perizinan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mendorong para pengusaha untuk mendaftarkan usahanya dengan memberikan informasi dan mempermudah proses perizinan.

d. Promosi dan Pemasaran

Upaya Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam promosi dan Pemasaran yakni dengan melakukan pameran produk unggulan yang bekerjasama dengan instansi lain.

KeberdayaaanUKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto antara lain yaitu

a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengusaha dan Karyawan

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah membawa dampak dengan terpenuhinya kebutuhan hidup yang lebih baik dari para pengusaha

- b. Pemberdayaan pemasaran hasil usaha yang dilakukan Disperindag telah berdampak pada semakin luasnya pemasaran mereka tidak hanya di wilayah lokal tetapi juga sudah mencapai regional bahkan internasional.
- c. UKM kerupuk rengginang telah mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang selama ini tidak bekerja akibat dari semakin minimnya lahan persawahan yang dulu menjadi salah satu mata pencaharian mereka.

Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan pengusaha kerupuk rengginang Dalam hal ini ada dua faktor yang berperan yakni :

a. Faktor Pendukung

1. Pelestarian Makanan Tradisional

Kekawatiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan keberlangsungan industri kerupuk rengginang yang kalah bersaing dengan produk-produk makanan modern membuat motivasi yang lebih untuk melakukan upaya pelestarian.

2. Tenaga Kerja Cukup Melimpah

Keberadaan para pengangguran yang diakibatkan dari semakin sempitnya lahan pertanian yang selama ini menjadi tumpuan utama masyarakat desa Sawahan membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdorong untuk melakukan pemberdayaan industri kerupuk rengginang.

b. Faktor Penghambat

### 1. Mahalnya Harga Bahan Baku

Salah satu kendala yang dihadapi adalah mahalnya harga bahan baku yaitu beras ketan, karena fluktuasi harga yang tidak stabil membuat pengusaha kerupuk rengginang tidak bisa memproduksi kerupuk dalam jumlah besar.

### 2. Tidak Adanya Kelompok Pengusaha atau Paguyuban

Dalam upaya pemberdayaan Dinas Perindustrian mengalami kesulitan karena ketidakadaan paguyuban sehingga saat ada bantuan mereka harus mendatangi rumahnya satu-satu ditambah jika ada bantuan dari pemerintah pusat mereka mengalami kesulitan karena salah satu untuk memperoleh bantuan harus ada lembaga usaha atau paguyuban

## B. Saran

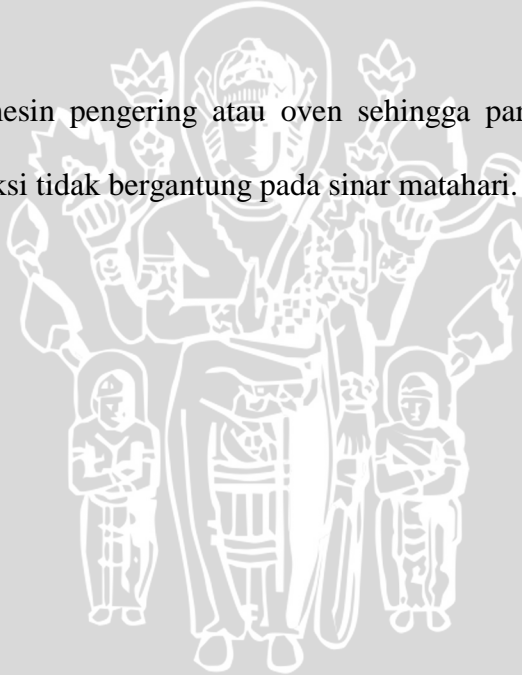
Berdasarkan atas kesimp

ulan diatas dan dari hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan terhadap Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto).

1. Untuk mengatasi mahalnya harga bahan baku maka dalam hal ini dapat dilakukan pemerintah khususnya Disperindag dengan memberikan subsidi atau memberikan rekomendasi mengenai tempat pembelian bahan baku beras ketan yang harganya sedikit dibawah harga pasar.



2. Mengupayakan lebih agar masyarakat segera membuat lembaga pengusaha atau paguyuban agar dalam setiap permasalahan dapat dipecahkan secara bersama-sama.
3. Dalam rangka peningkatkan daya saing krupuk rengginang supaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memberikan pembinaan dengan melakukan beberapa inovasi seperti penggorenganya dengan minyak yang rendah kolesterol sehingga bisa dinikmati semua kalangan.
4. Pemberian mesin pengering atau oven sehingga para pengusaha dalam proses produksi tidak bergantung pada sinar matahari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Bashith, Abdul. 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Basrowi, & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bayu Airlangga. 2007. *Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman*. Jogjakarta: Graha Ilmu
- Daryanto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Harjanto, Imam. 2008. *Berbagai Dimensi Administrasi Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Malang
- Yustika, Ahmad Erani. 2007. *Perekonomian Indonesia*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Jimung, Martin, Msi. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara
- Kartasmita, Ginandar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

Mashoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Papyrus.

Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang : Bayu Media

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Pranarka AMW dan Prijono, Onny S (Ed). 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSISPutra,

Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusuma. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum

Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi* Alih bahasa: Jusuf Udaya Lic, Ec. Jakarta: Arcan

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah (Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi & Pemberdayaan)*. Bandung: Mandar Maju.

Singarimbun, M dan Efendi, S. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES

Sjaifudin, Hetifah. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akatiga

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung



Sumodiningrat, dkk. 2000. *Kajian Paradigma Pemberdayaan Rakyat*. SPAMEN Angkatan VI

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT . Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media

Tambunan, Tulus. 2000. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Salemba Empat

Todaro, Michael P. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Tohar, M. 2002. *Membuka Usaha Kecil*. Jakarta : Kanisius

Triuwono, Iwan dan Ahmad Erani Yustika.2003. *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi dan Bisnis Pasca sentralisasi Pembangunan*. Malang: Bayumedia

.....2011, BPS Kabupaten Mojokerto Dalam Angka.

.....2013, Desa Sawahan Dalam Angka

.....2011, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto

.....2013, RKPD Kabupaten Mojokerto

Anonymous, *Kontribusi UKM terhadap PDB*, artikel diakses dari internet dengan alamat

website: [ekonomi.kompasiana.com/](http://ekonomi.kompasiana.com/) pada hari jumat, 30 juni pukul 21.30 WIB

Anonymous, [Finance.detik.com/](http://Finance.detik.com/) Pada hari Kamis 29 juni pukul 09. 11 WIB

Anonymous, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan*, Artikel diakses dari internet dengan alamat website : [www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id) / pada hari jumat 30 juni 2014 pukul 12.00

WIB

Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 Tentang Bidang / Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.

Peraturan Bupati No 55 Tahun 2008 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah.





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur  
Telepon/Fax. (0321) 321953  
Website : <http://kesbangpol.mojokertokab.go.id>

Mojokerto, 14 Juli 2014

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DISPERINDAG  
Kab. Mojokerto;  
2. Sdr. Kepala Desa Sawahan  
Kec. Mojosari

di -

MOJOKERTO

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 070/ 985 /416-206/2014

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	<p><b>LEMBAR PERSETUJUAN :</b></p> <p>Ijin Kegiatan Penelitian atau Riset perihal Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kecil Kerupuk Rambak (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto</p> <p>Oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.</p> <p>a.n. <b>M. Taufiq Akbar.</b></p> <p>Perihal Keberatan atau Tidak Keberatan Dilaksanakan Kegiatan</p>	1 (Satu) Lembar	Dikirim Untuk Menjadikan Maklum.

Diterima tanggal 23 - Juli - 2014

Penerima,

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN MOJOKERTO  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DAN KAJIAN STRATEGIS  
u.b.  
KASUBBID PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA



M. MUHAMMAD ARIFIN

NIP. 19640289 198603 1007



Drs. Awan Prihwantomo

Penata Tk. I

NIP. 19651228 199203 1 011



# LEMBAR PERSETUJUAN

## DATA PENELITIAN/PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

01. Nama Peneliti/Penanggujawab : **M. Taufiq Akbar**  
02. Alamat Peneliti/Nomor Telp./HP : **Medali Puri Mojokerto RT 3/RW 2 (085648032144)**  
03. Instansi/Civitas/Organisasi : **Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**  
04. Pekerjaan : **Mahasiswa**  
05. Kebangsaan : **Indonesia**  
06. Judul Penelitian/Kegiatan : **Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kecil Kerupuk Rambak (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto**  
07. Tujuan dan Maksud Penelitian/ Kegiatan : **Riset**  
08. Lokasi/Tempat Kegiatan/ Penelitian : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto; Desa Sawahan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto**  
09. Lama Penelitian/Kegiatan, terhitung mulai Tgl. : **6 (enam) bulan, mulai tanggal 17 Juli 2014 s.d 17 Januari 2015**  
10. Bidang Penelitian/Kegiatan : **Pemberdayaan**  
11. Status Penelitian/Kegiatan : **Mandiri**  
12. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : **-**  
13. Nama Anggota Peneliti/Kegiatan : **-**

Peneliti/Penanggujawab,

  
**M. Taufiq Akbar**

## LEMBAR PERTIMBANGAN

Nomor : 370 / 517 / 416.309.4 / 2014.... \*

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan ~~KEBERATAN~~ / TIDAK KEBERATAN \*\*) dilaksanakan kegiatan Studi Pendahuluan/ Penelitian/ Research/ KKN/ PKL/ KKL/ Observasi, oleh :

Nama Peneliti / Penanggujawab : **M. Taufiq Akbar**

Asal Instansi/ lembaga/ Organisasi : **Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Catatan :

Mojokerto, 23 Juli 2014

Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Camat \*\*)



**M. ARIFIN**

19640329 198603 1007

### Keterangan :

\*) Diberi nomor surat keluar dari Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Camat pemberi pertimbangan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.